

**LAPORAN PENELITIAN**  
**KETERWAKILAN**  
**PEREMPUAN**



**SUMATERA SELATAN**  
**2019**

# **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sepuluh tahun sejak disahkan Undang-Undang No. 2 tahun 2008 mengenai kewajiban partai untuk menyertakan perempuan minimal 30% dalam tiap tingkatan pencalonan diri di Pemilihan Umum Legislatif masih menimbulkan dinamika. Di tingkatan nasional calon legislatif terpilih yang berjenis kelamin perempuan menurun dari tahun 2009 sejumlah 101 anggota menjadi 97 anggota di tahun 2014. Sedangkan di tingkatan Provinsi, secara nasional persentase perempuan hanya naik 0,38% yaitu dari 15,94% ke 16,32%. Rendahnya keterwakilan perempuan mengakar pada kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik berkelindan dengan paradigma patriarki masyarakat mengakibatkan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang alpa pada kepentingan-kepentingan perempuan. Hal ini menyebabkan dinamika keterwakilan perempuan pada pemilihan umum 2019 menjadi topik yang memiliki urgensi tinggi untuk dibahas.

Di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah calon legislatif perempuan menunjukkan peningkatan sebesar 0,42%. Angka yang cukup kecil apabila dibandingkan dengan bertambahnya jumlah partai peserta pemilu. Namun dari segi keterpilihan, pada pemilu 2019 jumlah calon terpilih perempuan meningkat sebesar 5,3% dibandingkan dengan pemilu 2014. Peningkatan yang kurang signifikan ini terjadi karena rekrutmen partai menghambat perempuan untuk turut berkontestasi. Pola rekrutmen partai politik bersifat pragmatis sehingga cenderung mementingkan basis massa perempuan dan relasi dengan partai politik. Kombinasi antara sistem merit dan partisan ini dapat menghambat perempuan untuk menjadi kader partai politik atau calon legislatif. Sementara itu pihak KPU sendiri terkendala batasan-batasan regulasi yang tidak memungkinkan mereka

dapat melakukan terobosan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam kontestasi pemilihan umum. Sehingga sosialisasinya terbatas pada pendidikan politik untuk perempuan.

Peneliti merekomendasikan kepada KPU dan pihak terkait untuk dapat merumuskan kebijakan, instrumen serta perangkat yang memungkinkan KPU dapat meningkatkan keterwakilan perempuan. Dengan keterbatasan regulatori, KPU tetap dapat memainkan peran yang agak signifikan dalam upaya meningkatkan proporsi keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di masa depan terutama dengan fokus pada kegiatan pendidikan politik baik berupa program-program sosialisasi maupun kampanye publik terbuka. Pendidikan politik yang intinya membangun kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif baik tingkat pusat maupun daerah. Tentu saja strategi peningkatan keterwakilan perempuan ini seyogyanya dilakukan sebagai suatu strategi kolaboratif antara KPU dengan berbagai lapisan masyarakat yang *concern* dan terkait dengan isu keterwakilan ini. Termasuk di dalamnya kolaborasi antara KPU dengan—namun tidak terbatas—perguruan tinggi, organisasi-organisasi non pemerintah, organisasi-organisasi perempuan, organisasi komunitas dan sejenisnya.

# KATA PENGANTAR

Isu tentang keterwakilan perempuan senantiasa menjadi topik yang menarik terutama dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi. Demokrasi yang inklusif menghendaki keterwakilan yang memadai dari setiap unsur masyarakat, termasuk perempuan yang jika dilihat dari proporsinya terhadap populasi cukup besar jumlahnya dan akan terasa janggal berbicara demokrasi manakala keterwakilan unsur masyarakat yang memiliki proporsi cukup besar justru kurang terwakili (*under representation*). Upaya untuk memahami potret keterwakilan perempuan dalam bidang politik dengan demikian menjadi suatu pekerjaan penting yang diharapkan memiliki kontribusi penting pula untuk memperbaiki kehidupan demokrasi menjadi lebih baik.

Riset tentang keterwakilan perempuan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan ini dengan demikian menjadi salah satu upaya penting untuk menghadirkan potret tentang keterwakilan perempuan dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai hasil kontestasi dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 belum lama berselang. Kepercayaan yang diberikan oleh KPU kepada kami - Kelompok Kerja Riset M.H. Thamrin & Associates - untuk melaksanakan Riset ini dengan demikian patut diapresiasi setinggi-tingginya. Tidak saja karena kepercayaan yang telah diberikan kepada kami tetapi juga mengingat makna penting dari hasil riset ini untuk keberlangsungan demokratisasi yang lebih baik. Riset ini telah dilakukan sejak bulan Agustus 2019 dan hasil temuannya juga telah didiseminasi di hadapan publik pada tanggal 16 Oktober 2019 dan juga telah dirilis di berbagai media baik cetak, elektronik dan daring.

Naskah ini merupakan laporan akhir dari kegiatan riset tersebut dan telah diperbaiki berdasarkan beberapa masukan yang disampaikan oleh berbagai pihak pasca diseminasi hasil riset ini di hadapan publik tanggal 16 Oktober 2019 yang lalu. Untuk itu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak di antaranya ketua dan para komisioner serta staf KPU Provinsi Sumatera Selatan atas kepercayaan serta bantuan dan fasilitasi terutama data yang sangat membantu. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, para Ketua Partai Politik dan para calon dan anggota legislatif perempuan yang berkenan menjadi narasumber kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kelompok atau organisasi aktivis perempuan, aktivis demokrasi yang tergabung dalam Aktivis Sumsel Bersatu, perwakilan mahasiswa terutama dari FISIP Universitas Sriwijaya dan LPM Limas FISIP Unsri, serta para jurnalis dan awak media terutama yang tergabung dalam Forum Jurnalis Sumsel dan Ikatan Wartawan Online (IWO) serta berbagai pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Tak ada gading yang tak retak, walau banyak sekali dukungan telah diberikan oleh berbagai pihak namun berbagai kemungkinan masih adanya kekurangan dapat saja terjadi. Untuk itu kami mohon maaf dan berharap kiranya para pembaca sudi untuk memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua.

Palembang, Oktober 2019

Tim Peneliti Kelompok Kerja Riset M.H. Thamrin & Associates

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
<b>BAB II KAJIAN LITERATUR</b>	
2.1 Partisipasi Politik	9
2.2 Keterwakilan Perempuan dan Kebijakan Kuota	11
2.3 Tinjauan tentang Rekrutmen Politik	14
2.4 Pola Rekrutmen Politik	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Paradigma Penelitian	21
3.2 Pendekatan Penelitian	22
3.3 Informan Penelitian	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.5 Analisis Data	24
3.6 Keabsahan Penelitian	24
<b>BAB IV HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum	26
B. Deskripsi Hasil Penelitian	29
C. Implikasi Riset terhadap Arah Kebijakan	44
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	53

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sudah sekitar 10 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di dalamnya terdapat aturan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik (Gerintya, 2017).

Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan porsi perempuan di dalam kegiatan politik praktis. Tentu banyak sekali rintangan yang menghadang. Bahkan sampai sekarang, porsi 30% legislator perempuan di parlemen belum pernah benar-benar terpenuhi. Hasil pemilihan umum 2009 terdapat 101 anggota DPR perempuan, namun periode saat ini, 2014-2019, hanya ada 97 perempuan dari total 560 anggota DPR.

Penyebabnya tentu banyak hal. Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di DPR Ida Fauziah, saat ini keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pusat kian menurun idealnya, menurunnya partisipasi politik perempuan itu adalah satu karena tidak ada

ketertarikan dari perempuan itu sendiri. Kedua, memang ada faktor akomodasi partai politik. Ketiga, persoalan regulasinya. Yang kedua dan ketiga tentu bisa didorong (Fauziah, 2017). Belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan tentu menjadi persoalan yang perlu diperhatikan dengan seksama, karena keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting mengingat penyusunan undang-undang di berbagai sektor juga terkait dengan perempuan.

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya budaya pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan sulit dibendung.

Dalam konteks global, UNDP misalnya dalam salah satu publikasinya mengatakan bahwa partisipasi politik perempuan merupakan hal krusial untuk tujuan-tujuan global pencapaian demokrasi dan pembangunan berkelanjutan (2015). Tanpa partisipasi penuh dan setara dari perempuan dalam politik –baik sebagai pemilih, calon legislatif dan berbagai jabatan publik yang dipilih lainnya – maka demokrasi sesungguhnya belum dapat dikatakan tercapai. Karena – menurut publikasi UNDP itu pula – legitimasi kelembagaan politik dapat dipertanyakan manakala mereka tidak mencerminkan secara layak masyarakat yang mereka maksudkan untuk terwakili. Parlemen yang tidak sepenuhnya mencerminkan rakyat mereka – per definisi- tidak tidak dapat disebut telah menggambarkan rentangan bakat-bakat dalam masyarakat mereka sepenuhnya. Juga, mereka tidak dapat sepenuhnya paham dan memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan keseluruhan populasi. Bayangkan, dalam sebagian masyarakat global, perempuan meewakili lebih dari 50 persen populasi namun ironisnya tidak terjemahkan pada posisi-posisi kepemimpinan politik. Secara global, tujuan dari “keseimbangan gender” sebagaimana diekspresikan dalam *Beijing Platform for Action* pada tahun 1995, masih belum tercapai. Data UNDP (2015) memperlihatkan pada Januari 2016, perempuan hanya terwakili sebesar 22,6 persen dari semua parlemen nasional di dunia.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua pembacaan. Pertama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerap kali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.

Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol. Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi *vote getter* dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial. Rantai marjinalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek. Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah. (Hidayah, 2018).

Pada tahun 2019, tingkat partisipasi perempuan pada kontestasi pemilihan legislatif tahun 2019 naik. Sebagaimana dilihat di tabel 1.1, berdasarkan pendaftaran calon legislatif yang dilakukan 4 sampai 17 Juli 2018 lalu, persentase perempuan yang menjadi caleg pada Pemilu 2019 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu 2014. Dari sisi jumlah dan persentase caleg DPRD Provinsi Sumatera Selatan, misalnya, dari total 1.014 caleg pada Pemilu 2019, sebanyak 406 di antaranya perempuan. Adapun pada Pemilu 2019, persentase keterwakilan perempuan mencapai 40.04 persen.

Tabel 1.1 Jumlah Caleg dan Keterwakilan Perempuan di Sumatera Selatan tahun 2019

PARTAI	DAPIL	♀	♂	TOTAL	%♀
 PKB	10	44	31	75	41,33%
 BERKORPRI	10	46	29	75	38,67%
 PIPERINDO	10	46	29	75	38,67%
 KALILIRI PARTAI GOLKAR	10	43	32	75	42,67%
	10	47	28	75	37,33%
	9	14	12	26	46,15%
	10	38	26	64	40,63%
 PKS	10	39	27	66	40,91%
	10	47	28	28	37,33%
	10	41	26	26	38,81%
 PSI	8	27	20	20	42,55%
 PAN	10	46	29	29	38,67%
 HAN URA	10	45	29	29	39,19%
	10	45	30	30	40%
	10	32	25	25	43,86%
 PKI	4	8	5	5	38,46%
	<b>Jumlah</b>	<b>608</b>	<b>406</b>	<b>1.014</b>	

Sumber: KPU Sumatera Selatan (2019)

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bidang Pemberdayaan Perempuan, Hizbiyah Rahim menyebut, saat ini partisipasi politik perempuan di PPP mengalami peningkatan. Rahim menyebut dari tingkat pusat hingga daerah, PPP memiliki sejumlah program dan kegiatan yang merangsang keterlibatan perempuan. Menurutnya, kualitas perempuan di dunia politik saat ini semakin meningkat. Rahim yakin hal ini akan mendorong peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Menurutnya juga, saat ini perempuan sudah biasa membagi antara tugas sebagai istri dan ibu dengan kegiatan mereka di ruang publik. Menurutnya para suami saat ini sudah banyak yang memberi izin kepada istrinya untuk menunjukkan eksistensi di berbagai kegiatan yang ada. Dalam Islam, kegiatan istri di luar rumah memang harus mendapatkan izin dari keluarga dan suami. Dan saat ini istri mempunyai sejumlah kegiatan di luar rumah sudah biasa, dan mereka tetap tidak meninggalkan kewajibannya di rumah (Fauzi, 2018).

Para perempuan yang maju di pemilihan umum merupakan calon-calon yang benar-benar memiliki visi-misi dalam menjalani dunia politik praktis. Selama ini muncul stigma bahwa calon legislator perempuan kebanyakan hanya untuk memenuhi syarat kuota yang diminta oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, diharapkan munculnya figur-figur perempuan yang memang siap bertarung secara intelektual dalam rangka menyelesaikan ragam persoalan-persoalan kebangsaan.

Sumatera Selatan sendiri pada pemilu legislatif tahun 2014, menempatkan 12 perempuan dari total 75 caleg terpilih, atau hanya berkisar di angka 16%. Ini tentu masih jauh dari angka ideal seperti yang diurtarakan di atas yakni 30%. Di tahun 2019 ini, menurut data KPU ada 1.014 caleg DPRD Sumsel. Caleg DPRD Sumsel mayoritas laki-laki sebanyak 608 orang dan perempuan berjumlah 406 orang dari seluruh partai politik. Dan jumlah caleg perempuan di setiap parpol lebih dari 35% dari total keseluruhan calegnya. Jumlah caleg perempuan ini tentu masuk kategori cukup banyak. Sehingga akan sangat menarik untuk melihat bagaimana langkah-langkah parpol dalam melakukan rekrutemen anggota pengurusnya hingga bagaimana menentukan caleg perempuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dinamika calon legislatif perempuan pada pemilu serentak yang lalu, dari hulu hingga hilir. Dasar kegiatan penelitian ini adalah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1976/RT.05-SD/01/KPU/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pedoman Riset Kepemiluan 2019. Dengan dasar ini KPU Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan riset kepemiluan yang salah satunya adalah riset ini yang bertopik tentang Keterwakilan Perempuan. Dalam Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan – yang menjadi dasar kegiatan penelitian ini – disebutkan bahwa riset pemilu merupakan salah satu elemen strategis dalam manajemen pemilu. Hasil riset ini akan memastikan program dan kebijakan dalam pemilu tidaklah dibangun atas postulat spekulatif tetapi di konstruksi berlandaskan pada argumen empirik dan rasional dengan proses yang dapat dimanfaatkan. Disebutkan pula dalam kerangka acuan tersebut bahwa walaupun pemilu serentak 2019 telah selesai dan sesuai jadwal akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah catatan kritis. Masalah yang menjadi catatan kritis ini perlu untuk dibedah sedemikian rupa sehingga dapat dipahami akar masalah dan jalan keluar yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki manajemen pemilu.

Dengan dasar pemikiran inilah Riset kepemiluan 2019 dengan topik *Keterwakilan Perempuan* ini dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan pola rekrutmen politik dan partisipasi politik, akan dilihat bagaimana proses rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik, bagaimana peran caleg perempuan tersebut di dalam internal partai politik, bagaimana peran caleg perempuan dalam meraih suara, hingga tingkat keterpilihan calon legislatif perempuan tersebut. Kegiatan penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya menyangkut keterwakilan perempuan dalam pemilu serentak 2019 pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka ada beberapa identifikasi masalah:

1. Keterwakilan perempuan di parlemen masih belum sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan.
2. Caleg perempuan seringkali hanya menjadi pelengkap syarat partai politik, sehingga bagaimana proses rekrutmen calon legislatif perempuan oleh partai

- politik masih harus dipertanyakan, termasuk di dalamnya komitmen partai politik dalam mengakomodir peran-peran politisi perempuan.
3. Penting untuk melihat bagaimana cara berpikir patriarki yang selama ini dianggap sebagai salah satu penghalang munculnya caleg-caleg perempuan berkualitas.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa total jumlah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berjenis kelamin perempuan dari masing-masing parpol? Apakah mengalami penurunan atau peningkatan dari daftar DCT Pemilu 2014?
2. Berapa total jumlah calon terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berjenis kelamin perempuan? Apakah mengalami penurunan atau peningkatan dari daftar DCT Pemilu 2014?
3. Bagaimana pola rekrutmen calon legislatif perempuan dari masing-masing parpol?
4. Bagaimana strategi KPU Sumatera Selatan dalam menegakkan aturan tentang keterwakilan calon perempuan dalam proses pencalonan pemilu legislatif 2019 yang lalu?
5. Apa rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di pemilu mendatang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika calon legislatif perempuan pada pemilu serentak yang lalu, dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik, bagaimana peran caleg perempuan tersebut di dalam internal partai politik, bagaimana peran caleg perempuan dalam meraih suara, tingkat keterpilihan calon legislatif perempuan tersebut hingga bagaimana peran KPU dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Pemilu 2019 lalu serta strategi meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilu yang akan datang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana dinamika calon legislatif perempuan pada pemilu serentak yang lalu. Hal ini tentu akan berguna bagi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan untuk membangun strategi dalam sosialisasi politik kepada kaum perempuan di momen-momen kontestasi politik selanjutnya. Penelitian ini juga akan berguna bagi partai politik dalam menyusun pola rekrutmen yang baik bagi calon-calon politisi perempuan.

### **1.4.2 Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan sekaligus bahan penelitian kader maupun pengurus partai politik di Palembang dan Sumatera Selatan serta pembelajaran dalam mata kuliah gender dan politik.

## **BAB II**

# **KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 PARTISIPASI POLITIK**

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good governance*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Subakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin (2007:150) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Menurut Miriam Budiardjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiardjo, 2008: 369).

Sementara itu beberapa ahli lain mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah (Fouls: 1993). Herbert McClosky (1972: 252) memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Sedangkan Huntington dan Nelson (1997: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan

warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

## **2.2 Keterwakilan Perempuan dan Kebijakan Kuota**

Keterwakilan secara umum dapat dikatakan sebagai keterwakilan suatu pihak terhadap pihak lain. Berarti dalam konsep keterwakilan terdapat setidaknya dua aktor utama yakni *representative* dan *represented*. Dalam kaitan dengan keterwakilan politik atau yang terkait dengan pemilihan umum, Enrique Perruzotti dari Tella University mengatakan bahwa Representatif (wakil) adalah "... is someone who has been authorized to act with relative independence of the electorat" yang artinya seseorang yang memperoleh otoritas untuk bertindak dengan kebebasan relatif dari para pemilihnya. Sehingga menurut Perruzoti pula, seorang representatif tidak semata-mata bertindak atas kehendak rakyat yang diwakilinya namun wakil memiliki kebebasan –walau relatif- untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan terbaik. Representatif tidak hanya mengikuti saja apa-apa yang menjadi tuntutan dan kehendak dari rakyat. Untuk itulah diperlukan kepercayaan (*trust*) dari rakyat agar ketika menentukan kebijakan, pengambilan keputusan dan dalam bertindak, maka rakyat mempercayai si wakil bahwa itulah merupakan upaya terbaik yang dilakukan si wakil untuk rakyat pemilihnya.

Dalam “The Concept of Representation” yang ditulis oleh Hanna Pitkin (1967) dijelaskan pengertian tentang keterwakilan tetapi juga membedakan berbagai bentuk keterwakilan yang ada. Menurut Pitkin, representasi dapat diidentikan dengan dua hal. Pertama, mengenai kewenangan (otoritas) dan yang kedua tanggung jawab. Kewenangan ini sering dikenal dengan sebuah pelimpahan keterwakilan satu pihak (individu atau kelompok) ke pihak lain. Dengan kata lain adalah pemberian otoritasnya atau kewenangannya. Pemberian otoritas ini kemudian yang menjadi dasar tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mewakili. Namun, karena otoritas ini merupakan hasil yang didapatkan dari orang lain, terdapat sebuah mekanisme yang harus dijalani, yaitu tanggung jawab kepada yang diwakili. Jadi dalam hal ini, harus mampu memaknai hal tersebut dengan suatu relasi dua arah yang terjalin di mana otoritas yang diberikan harus dibarengi dengan tanggung jawab kepada yang memberikan otoritas tersebut.

Pitkin mengajukan empat hal yang menjadi pilar dalam model representasinya, yakni *representative* (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), kepentingan yang diwakili, dan konteks/setting politik. Keempat pilar tersebut memiliki ruang-ruangnya sendiri, di mana representasi terpilah-pilah berdasarkan ruang yang ada. *Representative* selalu berhubungan pada siapa yang mewakili seseorang atau kelompok didalamnya. *The represented* merupakan pihak yang diwakilinya. Dua dimensi lain yakni kepentingan yang diwakili dan setting sosial politik, menentukan bagaimana pola representasi bisa muncul dan berkembang pada ruang-ruang tersebut.

Dari keempat pilar tersebut, Pitkin membuat dua katagori yang menjadi pijakan dalam memahami model representasinya. Pertama yaitu “berdiri sebagai” (*stand for*), yaitu sebuah pola relasi yang terbangun karena pihak dibebani tanggung jawab, dan yang kedua adalah “beraksi menggantikan” (*act for*), relasi terjalin karena ada pihak yang diberikan tanggung jawab. “*Stand for*” dalam perkembangannya, memiliki dua macam model representasi. Pertama, representasi deskriptif, model ini lebih merupakan bentuk perwakilan yang berdasarkan kesamaan (deskriptif), dimana *representative* dan *the represented* sama-sama memiliki deskripsi yang sama. Dalam artian deskripsi terhadap kesamaan tertentu misalnya seorang perempuan mewakili kaumnya dalam sebuah forum. Kedua, representasi simbolik, model seperti ini merupakan bentuk representasi berdasarkan relasi simbolik yang ada di

socio-kultural masyarakat. Model simbolik ini berarti adanya simbol tertentu yang menjadi sistem kepercayaan dan hadir dalam kehidupan masyarakat yang menjadi keseharian. Misalnya tokoh adat atau kepercayaan terhadap sesuatu yang ada dalam socio-culture masyarakat setempat.

Lain halnya dengan model representasi “act for”. Pitkin menamainya sebagai representasi substantif. Sebuah bentuk representasi yang selalu mencari “isi” (substance) dari sebuah keterwakilan yang ada. Model ini memperlihatkan sesuatu yang menjadi tujuan bersama sehingga tercapai semua kepentingan dari segala pihak. Representasi model substantif ini sebenarnya model representasi yang menjadi titik tolak dalam demokratisasi yang menjadi tujuan dari representasi.

Topik mengenai kuota perempuan dapat merupakan jalan masuk yang baik untuk mencari apa yang membatasi dan meningkatkan keterwakilan substantif perempuan. Selain itu, kuota perempuan sangat erat terkait dengan debat keterwakilan deskriptif dan substantif pada saat mengaitkan kebijakan kuota, keterwakilan, dan efek dari kebijakan kuota tersebut.

Kuota perempuan adalah jumlah atau proporsi kursi atau tempat dalam daftar partai yang disediakan bagi perempuan (Stokes, 2005:77). Gagasan utama dibalik penetapan kuota ini adalah untuk menjamin kaum perempuan tercakup dalam politik (Dahlerup, 2007:78) dan ini terkait juga dengan argumen yang menyebutkan bahwa keadaan politik dengan keterwakilan perempuan yang rendah adalah politik yang tidak demokratis sehingga menetapkan kuota akan membantu mengoreksi situasi yang tidak adil ini. Namun argumen ini juga mendapat tentangan argumen lainnya yang mengaggap kuota tidaklah diperlukan karena situasi politik saat ini telah menawarkan kesempatan yang sama baik bagi perempuan atau pun pria (Stokes, 2005:79) dan menetapkan kuota akan menghasilkan diskriminasi terhadap pria (Dahlerup, 2007:75). Pandangan yang meng kaunter argumen perlunya kuota perempuan boleh jadi benar jika argumen utama dibangun atas fokus pada kesamaan kesempatan dengan gender menjadi satu-satunya variabel. Dikatakan oleh Dahlerup (2007:74) terdapat argumen lain bagi perlunya kuota yang tidak mengecualikan argumen kesempatan yang sama, yakni kepentingan dan pengalaman yang berbeda perlu untuk dicakup dalam politik. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa perempuan sebagai suatu

kelompok memiliki perbedaan dan kesamaan kepentingan dan pengalaman dibandingkan dengan kaum pria dan ini perlu untuk diartikulasikan dalam politik.

Beberapa riset di berbagai negara (Chen, 2010:13) menunjukkan pengalaman positif terhadap kuota gender ini dimana ketika terjadi peningkatan keterwakilan perempuan ternyata juga meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan. Studi lain dari India misalnya (Pande and Ford, 2011:1) memperlihatkan bahwa kuota gender telah mempengaruhi *outcomes* kebijakan. Beberapa argumen ini mendorong pada kaitan antara kuota dengan keterwakilan deskriptif dan substantif. Kuota perempuan hanya dapat menjamin keterwakilan deskriptif dari perempuan, namun keterwakilan substantif dari perempuan menyiratkan perempuan sebagai suatu kelompok memiliki kepentingan tertentu yang mereka inginkan terwakili.

### **2.3 Tinjauan tentang Rekrutmen Politik**

Kajian mengenai rekrutmen politik merupakan suatu studi yang luas dan banyak faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Rekrutmen politik berlangsung dalam suatu tatanan yang jelas membutuhkan keberlangsungan secara terus menerus dalam suatu lembaga. Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, seperti dalam momentum pemilu ataupun regenerasi kepemimpinan partai politik.

Menurut Ramlan Surbakti (1992:118), rekrutmen politik sebagai seleksi dan pemilihan atau pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem-sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Menurut fungsi ini semakin besar fungsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik otoriter, atau partai mayoritas dalam badan permusyawaratan rakyat sehingga berwenang untuk membentuk pemerintahan dalam sistem politik yang demokratis. Fungsi rekrutmen merupakan fungsi dari mencari

dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi keberlangsungan partai politik.

Meninjau dari pendapat tersebut, dalam rekrutmen politik pada hakekatnya dapat diartikan sebagai penyeleksian terhadap individu ataupun sekelompok orang dalam penempatan jabatan politik dalam sistem politik suatu negara. Fungsi rekrutmen tersebut dalam pengaplikasiannya diterapkan oleh partai politik disesuaikan dengan mekanisme masing-masing. Selain hal tersebut rekrutmen politik tidak hanya untuk mengisi jabatan politik semata tetapi kekuasaan yang lainnya. Dalam kaitannya terhadap partai politik, fungsi rekrutmen merupakan bagian yang sangat vital. Hal tersebut dikarenakan jika gagal melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik terancam keberlangsungan. Oleh sebab itu, partai politik memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya di mata masyarakat.

Menurut Afan Gaffar (1999: 155), Rekrutmen Politik merupakan proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Czudnowski (Sigit Pamungkas, 2011:91) mengartikan rekrutmen politik sebagai proses dimana individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Lebih jauh, Gabriel Almond (Lily Romli, 2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Dari pernyataan di atas, tujuan dari rekrutmen politik adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen politik juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut, aktor-aktor yang berkecimpung di dalam tersebut harus memiliki kualitas yang mumpuni serta melalui proses seleksi yang didasarkan pada latar belakang yang jelas. Tujuannya adalah agar rekrutmen yang dihasilkan untuk mengisi jabatan politik mampu

menjadi pelayan dan pelindung masyarakat. Artinya artikulasi kepentingan masyarakat dapat diperjuangkan.

Dalam konteks di Indonesia, sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik pasal 29, dijelaskan bahwa partai politik melakukan rekrutmen politik bagi warga negara Indonesia untuk pengisian jabatan politik seperti anggota partai politik, calon anggota dewan perwakilan rakyat tingkat pusat maupun daerah, calon presiden dan wakil presiden, serta bakal calon kepala daerah. Kemudian dalam perekrutan tersebut harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai politik tersebut.

#### **2.4 Pola Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui suprastruktur dan infrastruktur politik. Setiap sistem politik menganut pola rekrutmen yang berbeda-beda. Anggota yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan yang sangat dibutuhkan untuk menempati jabatan politik di pemerintahan. Berbicara hal tersebut partai politik juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda-beda antara satu partai dengan partai lainnya. Pola perekrutan politik disesuaikan dengan AD/ART dan kebijakan partai masing-masing.

Menurut Syamsuddin Haris (2005:8), Perekrutan anggota legislatif oleh partai politik secara umum mencakup tiga tahap penting yakni mencakup:

- Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai di tingkat des/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- Penyaringan dan seleksi calon yang telah dijaring. Tahapan ini meliputi interaksi antara elit tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten/kota atau cabang/daerah
- Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elit tingkat cabang/daerah, terutama pengurus harian partai tingkat

cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik. Biasanya cara partai melakukan tahapan-tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda-beda antara partai yang satu dengan partai yang lainnya. Czudnowski (1975) mengemukakan model yang digunakan partai politik dalam rekrutmen politik antara lain:

1. Rekrutmen terbuka

Syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit.

2. Rekrutmen tertutup

Berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

Berdasarkan dari pola yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan partai politik biasanya menggunakan pola-pola tersebut untuk merekrut calon legislatifnya. Dalam pelaksanaan pola-pola tersebutpun biasanya partai politik juga mempunyai metode-metode

tertentu dalam melakukan rekrutmen politiknya. Menurut Hasibuan (2006:52), cara rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

1. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pada pedoman tertentu yang berisi tentang standar-standar tertentu
2. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan pada perkiraan saja.

Adapun beberapa pola kecenderungan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik terhadap calonnya yakni sebagai berikut (Geddes: 1994):

1. *Partisan*  
Pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis biasanya kader internal partai
2. *Compartmentalization*  
Proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang
3. *Immediate Survival*  
Proses rekrutmen dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang direkrut
4. *Civil Service Reform*  
Proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih tinggi atau penting contoh non-kader namun mempunyai kedekatan dengan partai.

Dalam tahapan penetapan calon legislatif yang akan diusung oleh partai politik. Menurut Haryanto (1982) terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. **Pengalaman Organisasi**  
Pengalaman ini baik selama orang tersebut menjadi anggota partai maupun sebelum menjadi anggota partai, karena ini merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh seorang calon anggota parlemen dalam menjalankan roda organisasi nantinya.

## 2. Tingkat Pendidikan

Ditingkat pendidikan baik formal maupun informal, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan wawasan seseorang dalam menghadapi sesuatu masalah dan perilaku organisasi. Akan tetapi dalam AD/RT partai manapun tidak dicantumkan kriteria tingkat pendidikan sebagai persyaratan.

## 3. Pelatihan Kader atau Keterampilan Organisasi

Dimana hal ini merupakan pelatihan untuk memberikan keterampilan dan kemampuan seorang calon anggota didalam mengelola organisasi nantinya.

Dapatlah dikatakan bahwa di setiap sistem politik terdapat prosedur- prosedur untuk melaksanakan rekrutmen atau penyeleksian, akan tetapi walaupun prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh tiap-tiap sistem politik berbeda-beda satu dengan yang lainnya, namun terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah tetapi mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.

Sedangkan menurut Leijennar dan Niemaler (Norris, 1995) ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut:

1. Karakteristik kemampuan yang meliputi: Pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias tinggi serta mempunyai pengetahuan yang dalam terhadap isu- isu politik
2. Karakteristik yang melekat meliputi: jenis kelamin, usia, etnis dan penampilan
3. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas ditingkat lokal, dukungan massa partai politik dan organisasi kemasyarakatan
4. Agama, norma dan nilai meliputi: ketaatan beragama,kepedulian, dan kestabilan dalam kehidupan rumah tangga

5. Pengalaman politik meliputi: pengalaman politik dan pengalaman sebagai pekerja partai.

Berdasarkan tentang pendapat diatas mengenai tahapan dan pola rekrutmen politik, dapat disimpulkan jika proses rekrutmen bukan hanya sekedar menyeleksi dan menempatkan nama-nama orang atau kandidat. Tapi lebih penting dari itu adalah sejauh mana kandidat yang dipromosikan tersebut memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam mengemban tugas partai dan amanah para rakyat pemilih.

## **BAB III**

# **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana dinamika keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Dinamika tersebut akan ditinjau dari jumlah calon anggota DPRD Provinsi Sumatera selatan yang berjenis kelamin perempuan, jumlah calon perempuan yang terpilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pola rekrutmen calon legislatif perempuan di partai politik hingga strategi KPU setempat. Tujuan akhirnya adalah dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan tidak hanya dari segi kuantitas namun juga kualitas.

Untuk mengungkap permasalahan di atas peneliti akan menggunakan ragam teori mulai dari rekrutmen politik (Subakti: 1992), pola rekrutmen politik (Haris: 2005) serta berbagai konsep-konsep dari tradisi komunikasi politik yang berkaitan dengan gender. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti memilih paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian agar mendapatkan jawaban yang lebih mendalam sehingga diharapkan dapat merumuskan kebijakan ke depan yang lebih holistik.

### **3.1 Paradigma Penelitian**

Paradigma menurut Patton (2002: 69) merupakan pandangan atas dunia, sebuah siasat untuk mengurai kompleksitas dunia nyata. Dalam konteks sebuah penelitian, paradigma menunjukkan kepada peneliti hal-hal apa yang dianggap penting, logis, dan layak diamati dalam sebuah penelitian. Menurut Farber dalam Sarantakos (2013: 30) paradigma adalah

sikap filosofis dari peneliti yang berkaitan dengan metodologi, serta lingkup logika dan struktur dari penelitian yang menjadi petunjuk proses penelitian. Lebih lanjut Neuman (2014: 96) mengatakan paradigma merupakan keseluruhan kerangka berpikir yang terdiri dari asumsi dasar serta rangkaian teknik yang tepat untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan penelitian. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah rangkaian kerangka pikir yang menjadi dasar dan panduan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Menentukan paradigma kemudian menjadi penting karena paradigma memiliki konsekuensi tertentu terhadap rancangan dan desain penelitian.

Paradigma yang menjadi acuan penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah paradigma konstruktivisme. Secara umum Neuman (2014: 104) mengatakan bahwa tujuan paradigma konstruktivisme adalah memahami realitas sosial dan mengungkap bagaimana individu menyusun pemaknaan mereka atas suatu hal. Paradigma interpretif berpandangan bahwa kehidupan sosial individu merupakan sebuah *accomplishment* (sesuatu yang dicapai), artinya individu secara sengaja menciptakan realitas sosial mereka yang pada akhirnya berkaitan dengan interaksinya sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu paradigma konstruktivisme memandang realitas sosial sebagai realitas yang cair dan rapuh. Individu dapat melakukan konstruksi realita bersamaan dengan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi dan negosiasi.

Peneliti memilih posisi paradigma konstruktivisme karena penelitian ini berusaha untuk mengungkap tindakan yang bermakna secara sosial serta konstruksi realitas social perempuan dan partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalam politik secara subjektif dari sudut pandang orang yang mengalami hal tersebut. Dengan kata lain penelitian ini tidak hanya menggambarkan bentuk partisipasi atau pola perpolitikan yang terjadi namun mengungkap mengapa hal tersebut dapat terjadi.

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Merujuk terhadap paradigma dan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Daymon & Holloway (2010: 107) menyebutkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang

menggunakan pola pikir induktif, artinya pola, tema, dan kategori dimunculkan dari data yang ada, alih-alih dipaksakan sebelum pengumpulan dan analisis data dilakukan. Artinya penelitian tidak ditujukan untuk menguji suatu hipotesis tertentu namun untuk mencari pemaknaan terhadap suatu peristiwa, oleh karena itu penelitian kualitatif tidak memiliki kerangka kerja yang kaku dan cenderung memiliki fleksibilitas yang tinggi.

Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara yang direkam secara aktual dilengkapi dengan gestur dan nada bicara serta mengobservasi perilaku spesifik yang dilanjutkan dengan menganalisis dokumen tertulis dan mengamati gambar visual. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan metode yang kuat untuk memperoleh penemuan yang mendalam, serta pemahaman holistik mengenai pola dan strategi perempuan atau partai politik terkait isu representasi dalam pemilihan umum tahun 2019.

### **3.3 Informan Penelitian**

Patton (2002: 240) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif fokus untuk menggali kedalaman suatu fenomena dalam *sample* yang kecil. Informan dalam penelitian kualitatif harus memiliki pengalaman terhadap suatu fenomena, serta memahami dan memaknai isu yang ingin diteliti dan mau berpartisipasi dalam penelitian yang panjang, bersedia direkam dan dipublikasikan hasilnya. Oleh karena itu penelitian kualitatif menekankan pada relevansi partisipan bukan pada tingkat representasi. Berkaitan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, kriteria informan dipilih berdasarkan pengetahuan mereka terhadap isu yang akan dibahas dalam penelitian, oleh karena itu informan dalam penelitian ini adalah: Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, pengurus Partai Politik yang membidangi perekrutan, serta perwakilan dari calon anggota legislatif perempuan baik yang terpilih atau yang tidak.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini memiliki dua teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan untuk mencari tahu hal-hal yang tak bisa kita dapatkan dengan studi dokumentasi. Sebelum wawancara penulis merumuskan *outline* untuk mencatat isu yang ingin dieksplorasi bersama dengan informan sebelum wawancara dimulai. Hal ini menjadi panduan ketika wawancara dan memastikan bahwa topik wawancara telah sesuai dengan fenomena yang ingin diteliti. Wawancara mendalam menjadi data primer dalam penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi, penulis melakukan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sekunder mengenai keterwakilan perempuan pada pemilihan umum serentak 2019. Dokumen-dokumen yang dianalisis antara lain adalah: Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, AD/ART Partai Politik mengenai keterwakilan perempuan, serta peraturan-peraturan terkait partisipasi perempuan dalam pemilu. Studi dokumentasi menjadi data sekunder dalam penelitian ini.

### **3.5 Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis naratif. Sebagaimana yang diungkapkan Riessman (2008) analisis naratif merujuk pada sekumpulan metode untuk menafsirkan teks yang memiliki bentuk paparan. Artinya data yang didapatkan selama penelitian akan dianalisis untuk mendapatkan cerita, kronologi dari peristiwa yang tidak terungkap serta titik-titik balik yang menentukan peristiwa tersebut.

Dengan menggunakan analisis naratif maka tahapan awal setelah data terkumpul adalah menyajikannya dalam bentuk kronologis. Setelah itu mengidentifikasi cerita dan titik balik yang muncul. Setelah cerita teridentifikasi penulis menafsirkan makna yang lebih luas dari cerita tersebut dan menyajikan narasi yang berfokus pada proses, teori, dan kekhasan isu-isu terkait perempuan dari proses pemilihan umum serentak ini.

### **3.6 Keabsahan Penelitian**

Keabsahan penelitian adalah serangkaian kriteria untuk menilai kualitas suatu penelitian yang bersifat ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada kriteria dari Denzin & Guba (1995), yaitu *authenticity* (otentisitas) dan *trustworthiness* (kepercayaan). Otentisitas pada dasarnya adalah sejauh mana penelitian merefleksikan keadaan sesungguhnya dari suatu fenomena. Untuk meningkatkan otentisitas dari penelitian ini tentu peneliti akan melakukan konfirmasi ulang terhadap informasi yang penulis dapat mengenai interpretasi informan akan suatu fenomena dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu data yang didapat dari wawancara akan dikonfirmasi dengan data dokumen dan juga sebaliknya. Sedangkan dalam kriteria kepercayaan penulis akan meningkatkannya dengan menyertakan bukti-bukti kegiatan penelitian, misalnya berupa hasil wawancara, hasil analisis, informasi mengenai informan (sejauh yang disetujui oleh informan), serta konteks dan situasi yang sekiranya dapat mempengaruhi penelitian.

## **BAB IV**

# **HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum**

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2019 (disingkat Pemilu Legislatif 2019) diselenggarakan pada 17 April 2019 di Sumatera Selatan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 5.877.575. Di provinsi ini tercatat ada 3.238 kelurahan dengan 25.320 TPS. Jumlah pemilih laki-laki dan perempuan masing-masing 2,96 juta dan 2,91 juta. Mayoritas pemilih di wilayah ini terkonsentrasi di Kota Palembang yang mencapai 19 persen dari total pemilih di Sumatera Selatan. Dari angka tersebut, sebanyak 4.938.585 pemilih menggunakan hak pilihnya. Dari suara yang masuk, di antaranya 117.817 tidak sah. Sehingga, jumlah surat suara sah 4.820.768.

Riset ini fokus pada keterwakilan perempuan di Pemilihan Umum DPRD Provinsi 2019 di Sumatera Selatan. Peraturan KPU mengenai 30% keterwakilan perempuan adalah turunan dari UU Pemilu yang mengharuskan memenuhi 30% keterwakilan perempuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 245 dan 246. Menurut Nelli (2015) yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah partisipasi perempuan yang bermakna mewakili perempuan mewujudkan kondisi dan posisinya sebagai sumber daya insani pembangunan

yang berguna bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara. Keterwakilan perempuan kemudian menjadi isu penting karena memiliki dampak yang cukup tinggi terutama bagi kebijakan-kebijakan yang menyangkut perempuan nantinya.

Data dari KPU (2019) menunjukkan ada 406 calon legislatif perempuan *vis a vis* dengan 608 calon legislatif laki-laki. Sementara itu jumlah calon legislatif secara umum meningkat diimbangi dengan naiknya jumlah partai yang berkontestasi dalam pemilu ini. Secara umum, data tentang keterwakilan perempuan dapat dilihat di tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1 Calon Legislatif Perempuan pada tahun 2014 dan 2019**

2014				2019			
Partai	Caleg Perempuan	Caleg Laki-laki	Keterwakilan Perempuan	Partai	Caleg Perempuan	Caleg Laki-laki	Keterwakilan Perempuan
NASDEM	27	46	36,9%	PKB	31	44	41,33%
PKB	29	46	38,6%	GERINDRA	29	46	38,67%
PKS	27	43	38,5%	PDIP	29	46	38,67%
PDIP	28	47	37,3%	GOLKAR	32	43	42,67%
GOLKAR	29	44	39,7%	NASDEM	28	47	37,33%
GERINDRA	30	45	40%	GARUDA	12	14	46,15%
DEMOKRAT	28	43	39,4%	BERKARYA	26	38	40,63%
PAN	28	28	50%	PKS	27	39	40,91%
PPP	29	35	45,3%	PERINDO	28	47	37,33%
HANURA	28	47	37,3%	PPP	26	41	38,81%
PKB	29	46	38,6%	PSI	20	27	42,55%
PKPI	22	39	36,06%	PAN	29	46	38,67%
				HANURA	29	45	39,19%
				DEMOKRAT	30	45	40%
				PBB	25	32	43,86%
				PKPI	5	8	38,46%
<b>Total</b>	<b>334</b>	<b>509</b>	<b>39,62%</b>		<b>406</b>	<b>608</b>	<b>40,04%</b>
	Total caleg: <b>843</b>				Total caleg: <b>1014</b>		

Sumber: KPU (2019)

Dilihat dari masing-masing partai, tren perempuan masuk ke dalam politik meningkat perlahan. Sejumlah partai terlihat mengalami peningkatan caleg perempuan seperti PDIP, NASDEM, PKB, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura. Sementara itu PAN dan Gerindra mengalami penurunan jumlah calon legislatif perempuan. PKS mengalami stagnansi karena tidak mengalami peningkatan.

Namun persentase keterwakilan perempuan menjadi indikasi yang baik untuk menganalisis gejala ini. Apabila dibandingkan secara persentase jumlah calon legislatif perempuan ternyata menurun di partai-partai seperti PKS, PAN dan PPP. Hal ini disebabkan beberapa gejala mulai dari menurunnya jumlah total calon legislatif dan meningkatnya jumlah caleg laki-laki. Dapat dilihat juga pola penurunan ini ada di partai yang berlandaskan nasionalisme-konservatif. Partai-partai seperti PKS, PAN, dan PPP dengan kedekatan ideologis dengan agama seringkali dikambing-hitamkan sebagai penghalang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik.

Meskipun secara umum terlihat jumlah kenaikan calon legislatif perempuan sebesar 0,42%. Peningkatan ini tentu masih terlihat relatif rendah mengingat jumlah caleg meningkat sebesar 171 dan jumlah partai peserta pemilu meningkat sejumlah tiga partai. Selain data Calon Legislatif, penting juga untuk mencermati data calon legislatif terpilih pada Pemilu 2019. Datanya dapat dilihat di tabel 4.2 di halaman berikut.

Calon legislatif terpilih 2014 dan 2019 mengalami peningkatan sejumlah 4 atau meningkat sebesar 5,3% dari pemilu 2014. Tren keterpilihan perempuan meningkat di beberapa partai, seperti PKB, Golkar dan PDIP. PDIP menjadi partai yang paling menarik mengingat keterpilihan perempuan meningkat dua kali lipat dari tiga menjadi enam orang. Sedangkan penurunan calon terpilih ada di Gerindra. Gerindra kehilangan satu kursi untuk perempuan di pemilihan tahun 2019. Sedangkan partai-partai lain seperti Demokrat dan Nasdem mengalami stagnansi keterpilihan. Uraian ini memberikan landasan, gambaran, dan dinamika keterwakilan perempuan yang menarik di Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 4.2 Calon Legislatif Terpilih 2014 dan 2019**

	Partai	2014	2019
	PDIP	3	6
	DEMOKRAT	2	2
	GOLKAR	2	3
	GERINDRA	3	2
	PKB	1	2
	NASDEM	1	1
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>16</b>

## **B. Deskripsi Hasil Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua jenis data, data kuantitatif yaitu data Calon Legislatif Tetap dan Calon Legislatif Terpilih dan data kualitatif yaitu wawancara terhadap informan mulai dari calon legislatif DPRD Provinsi, pengurus partai sampai komisioner KPU. Kedua data ini kemudian dianalisis dan diekstraksi menjadi beberapa tema besar yaitu: geopolitik suatu daerah, pola rekrutmen politik, retorika perempuan di politik, dan kebijakan KPU. Tema ini kemudian akan diinterpretasi untuk mencari pola sehingga dapat memberikan gambaran yang luas terkait dinamika keterwakilan perempuan pada Pemilihan Umum di Provinsi Sumatera Selatan 2019.

## **Geopolitik juga Penting**

Melihat data Calon Legislatif Terpilih di Tabel 4.2. Maka Daerah Pemilihan Umum 5 di Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) patut menjadi perhatian. Karena merupakan Daerah Pemilihan dengan jumlah perempuan terpilih terbanyak yaitu 3 dari total 7 anggota terpilih di Dapil tersebut. Sementara itu dari dua dapil yang ada di Palembang, jumlah total calon 13 hanya ada 1 perempuan terpilih. Sisanya di masing-masing Dapil terdapat dua perempuan yang berhasil menduduki kursi anggota dewan.

Hasil ini tentu memberikan nuansa yang menarik dalam perkembangan penelitian mengenai keterwakilan perempuan, Kellog *et al.* (2017) mengatakan bahwa di Amerika perempuan cenderung lebih banyak menempati posisi politis di kota-kota yang cenderung liberal sedangkan di kota yang memiliki tingkat religiusitas tinggi perempuan cenderung lebih sedikit menempati posisi dewan kota. Kedua hal yang sangat kontras dengan penelitian ini.

Dari data tersebut juga terlihat Palembang sebagai pusat dari Sumatera Selatan justru mengalami kontradiksi. Kontras dengan penelitian Reingold dan Owen (2012) yang mengatakan bahwa perempuan cenderung terpilih di kota-kota besar, dimana perempuan memiliki kuliah yang lebih tinggi, memiliki usaha sendiri, dan penghasilan yang relatif besar. Justru hasil pemilihan umum menunjukkan dua daerah pemilihan di Palembang menjadi bukti bahwa perempuan kurang mendapat posisi di kota besar seperti Palembang. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, RA Anita Noerihati mengatakan hal ini terjadi karena dua Daerah Pemilihan yang ada di Palembang merupakan Daerah Pemilihan dimana banyak petinggi partai politik berkontestasi di dua dapil tersebut.

Menarik untuk melihat bagaimana tanggapan beberapa narasumber yang diajukan fenomena ini. Terdapat beberapa respon yang cenderung menegasi persoalan anomali geopolitik ini. Respon kelompok ini pada umumnya menjawab bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan. Persoalan masih “enggannya” pemilih perempuan untuk memilih calon perempuan sendiri sebenarnya tidaklah terkait langsung dengan persoalan geopolitik melainkan merupakan kondisi yang umum. Maksudnya, para pemilih cenderung

memilih mereka yang “dikenal” tanpa memperhatikan jenis kelamin dengan dalih tingkat keyakinan akan memperjuangkan kepentingan mereka sebagai pemilih. Manakala pemilih perempuan yakin bahwa calon perempuan yang maju dalam kontestasi tidak saja akan mewakili kaum perempuan tetapi juga akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan spesifik kaum perempuan sudah barang tentu mereka akan lebih memilih calon perempuan tersebut. Dengan kata lain, persoalan mengapa seorang perempuan memilih calon perempuan atau bukan lebih merupakan persoalan keyakinan atau kepercayaan (*trust*) pemilih terhadap si calon dan tidak berkaitan secara langsung pada persoalan keunikan daerah tertentu atau aspek geopolitik.

Selain itu, banyaknya alternatif pilihan dalam sistem pemilu serentak kali ini juga menyulitkan para pemilih khususnya pemilih perempuan untuk memusatkan perhatian dan pilihannya secara spesifik pada calon perempuan saja. Manakala pada daftar calon tidak dijumpai nama yang mereka “kenal” maka kecenderungan memilih adalah pada nama-nama “besar” atau pun nama-nama calon yang paling sering dipaparkan kepada mereka.

Tanggapan lain yang menentang perspektif anomali geopolitik ini mendasarkan argumennya pada “kerasnya pertempuran” di antara para calon. Daerah perkotaan, khususnya kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan dinilai beberapa narasumber sebagai kawasan pertempuran yang paling sengit. Dimana hampir semua Ketua Partai Politik atau setidaknya petinggi Partai Politik maju sebagai calon dalam daerah pemilihan yang mencakup kota Palembang. Dengan kata lain, mereka yang berargumen bahwa lebih rendahnya angka keterwakilan perempuan di kota Palembang dibandingkan dengan daerah pemilihan luar Palembang lebih disebabkan oleh kerasnya persaingan di daerah kota Palembang dibandingkan daerah lainnya. Atau dalam istilah mereka, merebut kursi di daerah pemilihan Palembang “lebih berdarah-darah”. Kondisi ini diperlihatkan oleh mereka bahwa anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terpilih dengan meraih suara terbanyak tidak berasal dari daerah pemilihan Palembang tetapi justru dari daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Tentu saja respon yang menentang perspektif anomali geopolitik ini terlalu dini untuk dijadikan kesimpulan umum tentang pola umum konstestasi yang bersifat dikotomis dimana pemilih perkotaan cenderung lebih rasional dibanding kawasan pedesaan (baca: kabupaten). Data berikut ternyata memperlihatkan kecenderungan yang lain dan tidak bisa diabaikan begitu saja.

Dari sudut pandang lain, data BPS (2018) menunjukkan, pada tahun 2017 OKU dan OKUS justru merupakan daerah yang memiliki tingkat rasio laki-laki dan perempuan paling tinggi, yaitu berjumlah 104 dan 110 yang 10 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan berbanding dengan 104 dan 110 penduduk laki-laki. Dari hasil Indeks Pembangunan Gender (IPG) Ogan Komering Ulu BPS (2017) menunjukkan bahwa Ogan Komering Ulu merupakan daerah dengan hasil IPG yang lebih tinggi dibandingkan IPM (Indeks Pembangunan manusia) artinya perempuan memiliki angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang cukup tinggi di Ogan Komering Ulu.

Sedangkan data BPS (2019) Kota Palembang menunjukkan, rasionya antara penduduk laki-laki dan perempuan cukup rendah, 104, yang artinya 100 penduduk perempuan berbanding dengan 104 penduduk laki-laki menandakan keseimbangan. Sedangkan hasil Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Palembang menempatin kuadran 1, yang artinya secara umum IPM dan IPG berada di atas rata-rata Sumatera Selatan. Artinya, Kota Palembang tidak begitu memiliki masalah terhadap akomodasi hak-hak perempuan terkait kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Namun hasil pemilu menunjukkan pemilih di Palembang masih enggan memberikan hak suaranya kepada calon perempuan.

Kondisi geopolitik suatu daerah kemudian dapat menjadi *insight* yang menarik, hal ini menandakan bahwa daerah yang memiliki disparitas IPG dan IGM yang cukup tinggi justru meloloskan banyak caleg perempuan ke DPRD Provinsi. Data ini kemudian perlu ditelisik lebih lanjut apakah sekedar anomali atau merupakan titik temu bagi peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Sumatera Selatan.

## **Rekrutmen Perempuan di Sumatera Selatan: Antara Meritokrasi dan Partisan**

Dari beberapa perempuan yang menjadi informan penelitian ini, hampir semuanya memiliki pengalaman organisasi. Lebih lanjut kebanyakan dari mereka memegang jabatan penting yang dekat dengan masyarakat, mulai dari istri bupati hingga ustadzah dengan jamaah 1000 orang. Dengan basis massa sebesar itu, perempuan-perempuan ini menjadi mesin partai yang cukup efektif untuk menarik simpati massa.

Pada Pemilihan Umum lalu Di Sumatera Selatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berhasil menjadi partai yang paling banyak meloloskan calon legislatif perempuan yaitu sebanyak 6 orang. PDIP mengalami kenaikan jumlah anggota legislatif perempuan terpilih dari 3 orang di tahun 2014 menjadi 6 orang di tahun 2019. Hal ini, menurut Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan, Giri Ramanda Kiemas sudah dapat diprediksi oleh DPD PDIP Sumatera Selatan. Dari 10 Dapil di Pileg DPRD lalu, PDIP menargetkan masing-masing 2 kursi dengan komposisi satu laki-satu laki dan perempuan, kecuali di 2 Dapil di Kota Palembang. PDIP berusaha untuk mencari perempuan-perempuan yang bisa mendulang suara. Contohnya, PDIP menawarkan istri-istri anggota legislatif atau kepala daerah untuk mencalonkan diri, dengan alasan mereka sudah mengerti politik, biasa berdinamika di akar rumput melalui kegiatan-kegiatan seperti PKK dan pengajian-pengajian, dan juga sudah terbiasa mengikuti kegiatan politik suami. Sehingga mereka bisa luwes turun ke masyarakat, dan partai tidak susah lagi untuk melatihnya.

Dari 6 caleg yang lolos ke DPRD Sumsel dari PDIP, kesemuanya memang mempunyai latar belakang seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pertama, Tina Malinda, memang sudah lama menjadi anggota legislative, bahkan sejak tahun 1999. Tina Malinda pernah duduk di DPRD kabupaten selama 3 periode, di DPRD Provinsi 1 periode, dan kemudian terpilih lagi untuk kedua kalinya di DPRD Provinsi. Lalu, Ike Mayasari, yang memang memiliki latar belakang keluarga politisi. Ayahnya, Fikri Juhan, adalah seorang mantan anggota DPRD Provinsi, kakaknya Abdiyanto Juhan juga seorang anggota legislatif kabupaten OKI. Ike mencalonkan diri menggantikan ayahnya di DPRD Provinsi tahun 2014, lalu kemudian berhasil lolos. Dan sebagai *incumbent* di pemilu tahun ini, ia juga berhasil lolos.

Kemudian Sumiati, yang kali ini merupakan periode ketiganya duduk di kursi DPRD Sumsel. Di periode pertama tahun 2009-2014 ia duduk penuh, lalu di periode kedua, ia duduk sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW), dan di tahun ini ia kembali terpilih. Sumiati memiliki suami yang merupakan seorang organisator, mantan ketua FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI-Polri) Sumatera Selatan. Kemudian Meli



Mustika, sebelumnya adalah anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dan juga merupakan istri dari Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam. Lalu Susi Imelda, merupakan istri dari wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi. Ia sudah menjadi pengurus partai selama dua periode. Di pemilu sebelumnya sudah pernah ikut berkontestasi, namun belum terpilih. Lalu Rita Suryani, adalah istri dari wakil Bupati Musi Rawas Utara, Devi Suhartoni.

Menurut Giri Ramanda, PDIP sebenarnya juga sadar bahwa memang ada kesulitan untuk mencari politisi yang organik berkarir dari bawah. Untuk mengantisipasi hal itu, sudah lama PDIP berpedoman pada regulasi yang menuntut parpol harus memenuhi kuota perempuan sebanyak 30%. Di pengurus partai dari tingkat DPD hingga PAC terpenuhi kuota pengurus perempuan sebanyak 30%. Memenuhi kuota 30% perempuan ini juga bertujuan untuk melaksanakan kaderisasi yang lebih baik lagi terutama untuk perempuan. Saat ini, ada dua perempuan yang duduk sebagai ketua DPC PDIP.

Selain itu, agar caleg perempuan juga menjadi lumbung suara bagi PDIP, mereka merekrut kader-kader perempuan yang merupakan tokoh masyarakat dan aktivis. PDIP berusaha untuk mencari calon-calon legislatif yang tidak hanya sekedar pemanis, tetapi juga pejuang di akar rumput untuk mendapatkan suara. Di Muara Enim misalkan, PDIP berhasil meloloskan Munyati yang merupakan seorang akademisi, dan sudah terbiasa melakukan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menurut Giri, PDIP juga tetap merekrut ibu rumah tangga biasa dengan memperhatikan bagaimana latar belakang keluarga. Misalkan, ia berasal

dari keluarga besar dan mampu mengkonsolidasikan suara keluarganya tersebut, maka ia dianggap sebagai caleg potensial. Dan Giri juga mengakui bahwa di beberapa daerah tertentu, PDIP juga hanya memenuhi syarat kuota perempuan saja.

Pendaftaran caleg di PDIP dibuka secara umum dan terbuka melalui website. Media, dan melalui spanduk di tiap kecamatan. Pendaftar diminta untuk melengkapi berkas, sesuai dengan persyaratan. Setelah melengkapi berkas, mereka akan menjalani fit and proper test berupa tes psikologi, lalu menjawab pertanyaan mengenai motivasi serta minat dan bakat, lalu terakhir tentang visi misi serta agenda mereka nanti jika terpilih duduk di badan legislative. Kemudian dari data itu, DPP mengklasifikasikan caleg-caleg prioritas yang memenuhi standar utama. Dari sana kemudian disesuaikan dengan peraturan partai, seperti pemberian nomor urut. Karena di PDIP ada aturan seperti pengurus DPD harus lebih didahulukan ketimbang DPC. Jika ada jabatan yang sama, maka akan dilihat dari skoring. Skoring ini adalah penilaian yang dikumpulkan berdasarkan pengalaman kader tersebut berdinamika di partai: seperti pernah berapa kali menjadi anggota legislatif, atau sudah berapa lama menjadi pengurus partai. Skor ini berdasarkan standar baku aturan partai. Ini artinya loyalitas terhadap partai menjadi salah satu ukuran.

Semua calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan asal PDIP diwajibkan untuk mengikuti kaderisasi partai. Hal ini dikonfirmasi oleh dua legislator terpilih yang diwawancarai, yaitu Rita Suryani dan Susi Imelda. Untuk tingkatan kabupaten harus sudah menjalani kaderisasi tingkat Pratama (Level 1), untuk Provinsi harus ikut kaderisasi tingkat Madya (Level 2). Untuk semua caleg terpilih tingkat kabupaten, harus mengikuti tingkat Madya, dan caleg DPRD Provinsi terpilih harus mengikuti tingkat Utama (Level 3). Kaderisasi ini berjalan rutin tiga kali dalam setahun. Jadi, ketika seorang kader sudah berdinamika menjadi anggota biasa selama 6 bulan, ia berhak untuk mengikuti kaderisasi tingkat pratama.

Giri menambahkan, bahwa terkait dengan proses kaderisasi ini, perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan masih 85:15. Saat ini di DPD PDIP Sumatera Selatan sudah mendidik kader pratama sebanyak 2.800 orang, 300 diantaranya adalah perempuan. Dan

mereka ini adalah sumber utama yang akan dimajukan sebagai calon legislatif. Dengan jumlah sebanyak itu, PDIP sendiri merasa tidak begitu kesulitan untuk mencari caleg perempuan. Namun untuk mencari caleg yang siap bertarung, itu masih sulit.

Terkait dengan proses kaderisasi ini, informan dari Partai Golkar, RA Anita Noeringhati mengatakan bahwa keberhasilan Golkar secara konsisten mendudukkan legislator perempuan di DPRD Sumsel dikarenakan faktor berjalannya dinamika organisasi sayap yaitu disebut KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar). Sayap organisasi ini lah bisa disebut menjadi pencetak kader perempuan yang siap untuk bertarung dalam beragam kontestasi politik. Di pemilu lalu, Golkar berhasil mendudukkan tiga kader perempuan, yakni RA Anita Noeringhati sendiri, yang sudah duduk selama dua periode, lalu Lindawati Syarfie yang juga merupakan *incumbent*, dan Nadia Basyir. Golkar berhasil menambah satu kursi perempuan dari semula hanya 2 di tahun 2014.



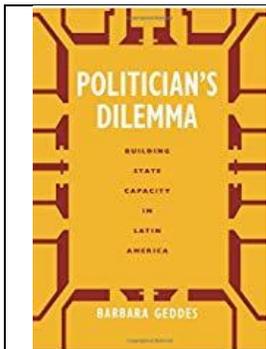
*R.A. Anita Noeringhati*

Anita sendiri merupakan wakil ketua KPPG Sumatera Selatan selama 2 periode, mulai dari 2009 hingga 2015. Menurut Anita, secara umum kaderisasi Partai Golkar ditentukan oleh faktor loyalitas, pendidikan dan kehendak pimpinan. Dedikasi kepada partai itu nomor satu.

Terwujud dalam bentuk tanggungjawab, menyelesaikan semua kerja partai yang sudah diamanatkan. Kader juga harus taat dan patuh tata aturan partai. Kader juga harus taat pada pemimpin, yang tercermin dari hal selalu menghadiri rapat dan wajib mengikuti kegiatan partai.

Jika melihat dari sisi alasan mengapa seorang politisi perempuan memilih partai, dua informan dari PDIP di atas menjawab alasannya adalah kedekatan orang tua mereka dengan PNI. Kedekatan itu membuat mereka merasa bahwa PDIP merupakan partai yang tepat untuk mereka mengaspirasikan tindakan politik mereka. Sementara Informan dari PAN menganggap bahwa saat Reformasi, PAN merupakan partai berbasis islam yang cukup progresif.

Dari data ini tentu bahwa tidak semua perempuan memilih partai berdasarkan asas kekerabatan, namun ada perempuan yang cenderung memilih partai berdasarkan ideologi dari partai tersebut. Di sisi lain, basis massa yang dibawa oleh kandidat-kandidat tersebut tentu dapat mendongkrak suara partai. Oleh karena itu sulit untuk mengkotakkan proses rekrutmen partai politik dengan tipologi yang dibuat oleh Barbara Geddes (1996). Bercampurnya konservatisme dan nilai-nilai agama menjadikan perempuan Indonesia sulit untuk membangun karir politik yang baik. Sementara itu sulit bagi seorang perempuan untuk masuk ke dalam partai politik, apabila tidak memiliki kedekatan hubungan baik yang bersifat keluarga atau kekerabatan dengan suatu partai. Apabila basis massa itu dapat dianggap sebagai sebuah prestasi maka, sistem rekrutmen politik di Indonesia dapat dikatakan sebuah penggabungan antara sistem partisan dan *civil service reform*.



Barbara Geddes (1996)

Klasifikasi sistem rekrutmen politik

1. Partisanship
2. Meritocratic
3. Survival
4. Compartmentalization

Dengan menggunakan tipologi Geddes (1996) maka proses rekrutmen politik *civil service reform* yang berbasis meritokrasi tampaknya lebih merupakan kecenderungan pola rekrutmen partai politik dalam mengajukan calon-calon dari partainya. Partai besar seperti PDIP sendiri menyelenggarakan seleksi wawancara pada calon-calon legislatifnya, tidak terkecuali calon perempuan. Selain itu terlihat dari latar belakang perempuan-perempuan yang terpilih di Partai PDIP merupakan perempuan dengan basis suara yang cukup besar. Hal ini masuk ke dalam sistem merit khas rekrutmen *civil service reform* yang berpusat pada pelaksanaan seleksi dan promosi yang didasarkan pada performans dari calon legislatif itu sendiri. Sementara itu sulit untuk perempuan masuk ke dalam politik tanpa kedekatan atau kekerabatan, sehingga masuk ke dalam partai membutuhkan subjek tertentu yang merekomendasikan dan mempromosikan mereka untuk masuk atau mengikuti proses seleksi. Sehingga dalam hal ini proses meritokrasi bergabung dengan partisan memberikan nuansa tersendiri dalam proses rekrutmen politik di Indonesia, terutama bagi perempuan.

Secara umum, Giri menganggap bahwa memang ada kesulitan untuk mencari perempuan yang mau berpolitik. Jika hanya sekedar untuk mencalonkan diri cukup banyak. Tapi jika ingin mencari perempuan yang siap bertarung secara total, cukup sulit. Salah satu faktornya adalah perempuan masih banyak yang menganggap bahwa dunia politik penuh dengan ketidakpastian, artinya setiap politisi betul-betul harus hidup dalam semacam pertarungan hidup. Selain itu, juga ada kendala domestik, seperti tidak mendapatkan izin dari suami. Untuk menanggulangi kasus tersebut, partai harus memastikan dulu bahwa si caleg perempuan harus mendapatkan restu dari suaminya, meskipun proses ini tidak dilakukan secara legal formal. Namun, sejauh ini tidak pernah ada masalah terkait dengan izin suami tersebut. Bahkan di beberapa kasus, suami ikut bantu turun tangan dalam proses kontestasi tersebut.

Ada sebuah kasus unik, walaupun terjadi di pemilu eksekutif (Walikota), yaitu Fitrianti Agustinda (Wakil Walikota Palembang Terpilih 2018-2023), yang bersuamikan seorang PNS, dimana suaminya ini kemudian mengundurkan diri dari PNS untuk kemudian terjun ke dunia politik. Ia kemudian berhasil terpilih menjadi anggota legislatif. Ini hanya

sekedar menyebut contoh akan pentingnya dukungan keluarga atau secara lebih spesifik dukungan suami terhadap istri yang meniti karir politik.

RA Anita Noeringhati pun bercerita bahwa keputusannya terjun di dunia politik ini sudah mendapat dukungan keluarga. Kebetulan suaminya juga seorang kepala dinas, sehingga mereka punya kesibukan masing masing. Oleh karena itu, agar urusan domestiknya tidak terbengkalai, Anita mengkhususkan hari Sabtu dan Minggu sebagai hari bersama keluarga. Anita mengatakan, dalam menjalankan kegiatan politiknya, Anita merasa tidak ada perbedaan dengan laki-laki. Kalau pun ada perbedaan, hanya berupa tidak berkampanye pada malam hari.

Hal ini semakin mempertegas bahwa proses rekrutmen perempuan dalam kontestasi pemilihan umum legislatif cenderung bersifat pragmatis. Setidaknya terdapat dua saringan yang harus dihadapi oleh seorang perempuan untuk terjun ke arena politik. Filter atau saringan pertama adalah keluarga. Dukungan keluarga mejadi prasyarat mutlak. Tanggungjawab perempuan untuk lebih mendahulukan persoalan domestik rumah tangga menjadi dasar saringan ini.

Saringan atau filter berikutnya adalah potensi elektabilitas. Membangun elektabilitas bagi seorang pendatang baru tentu saja lebih sulit ketimbang mereka yang telah memiliki modal politik sebelumnya. Modal politik itu tidak saja berupa kinerja politik yang bersangkutan, tetapi juga asosiasi terhadap kinerja politik dari kerabat atau pun patronnya. Rekrutmen perempuan di partai politik lebih mementingkan basis massa yang dimiliki perempuan sebagai *merit* yang dimilikinya. Karena yang dituntut adalah basis massa, maka elektabilitas menjadi prioritas bagi partai bukan ketertarikan calon legislatif perempuan terhadap isu-isu pemberdayaan.

### **Androgini Perempuan sebagai Retorika Politik**

Dari perempuan yang menjadi informan dalam penelitian ini, mereka semua sepakat bahwa tidak ada diskriminasi dari partai, masyarakat, atau konstituen sebagai perempuan. Mereka merasa bahwa masyarakat mendukung mereka untuk mewujudkan aspirasi dari masyarakat-masyarakatnya. Sebelum terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera

Selatan, Susi Imelda dan Rita Suryani dari PDIP merupakan ketua dari Ibu-Ibu PKK dan sebagai istri dari bupati di daerah masing-masing. Hal ini dimanfaatkan mereka untuk dapat berkeliling mencari suara warga.



*Rita Suryani*

Selama berkeliling Daerah Pemilihan, mereka menceritakan pengalamannya bertemu dengan berbagai macam orang, dan menceritakan bagaimana partai turut membantu dengan ranting. Sementara itu Susi Imelda membuat sebuah komunitas yang terdiri dari berbagai partai. Namun dari situ ada satu titik temu yang menarik, mereka berdua menjadi figur yang berada di atas partainya sendiri. Di lain kesempatan pemilihan serentak ini justru membuat mereka merasa merugi, pasalnya adalah perahu partai yang mereka usung kadang berbeda dengan pilihan presiden dari konstituennya. Keduanya punya visi yang sama untuk perempuan di dapil mereka, Rita Suryani ingin membantu dari segi kesehatan dan ekonomi, sedangkan Susi ingin membuat rumah akar rumput untuk membantu perempuan berhenti dari pekerjaan kasar dan beralih ke industri kreatif

Dari visi mereka terlihat bahwa pengalaman sebagai perempuan yang hidup dalam masyarakat patriarki menegaskan *personal brand* mereka sebagai politisi. Visi-visi feminim lekat dengan kehidupan mereka sebagai perempuan yang terjewantahkan dalam visi mereka

yang sifatnya lebih individual, intim dan pribadi. Retorika politik seperti ini yang membantu mereka masuk menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Campbell (1989) istilah '*personal as political*' merupakan bagian yang lekat dari kehidupan politisi perempuan. Retorika feminim mereka merupakan senjata bagi mereka untuk dapat menarik suara warga.

Namun, tidak setiap saat perempuan menjadi seperti itu, terkadang perempuan menjadi androgini (pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan), dalam retorika politik terutama ketika kampanye. Rapat hingga larut, pulang malam, tidur di rumah warga, dan hal-hal yang bersifat maskulin lainnya, namun terkadang tetap harus ditemani oleh suami yang menyiratkan kondisi feminim dilakukan hal ini merupakan strategi yang digunakan oleh perempuan untuk lagi-lagi mendulang suara. Sehingga dalam politik perempuan menjadi androgini atau hibrida antara feminim dan maskulinitas.



Sebagaimana yang dikatakan oleh Janis (2009) pengalaman politik, sering lebih menguntungkan laki-laki dan kepribadian maskulin. Atribusi laki-laki yang memiliki pengetahuan yang luas, paham di bidang ekonomi dan finansial disandingkan dengan atribusi perempuan yang sensitif, penuh kasih sayang, berorientasi dengan keluarga. Laki-laki dalam situasi politik umum menunjukkan *pseudo-intimasi* yang menyebabkan mereka berada dalam tataran yang cukup feminim. Namun dalam institusi politik hal itu tidak bisa diterima

sepenuhnya, mereka berada dalam tataran situasi dan kondisi dimana hal itu dapat merusak citra mereka. Berbeda jika atribusi sebaliknya didapuk ke perempuan.

Sebagaimana temuan dalam penelitian ini, ketika perempuan dapat memanfaatkan *stereotype* yang dilekatkan pada diri mereka dengan baik untuk mendulang suara. Tidak hanya para calon legislatif perempuan di daerah umumnya terjun langsung dan menarik suara dengan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh laki-laki, misalnya kampanye hingga larut malam, berdiskusi, sampai dengan cara tersebut maka perempuan dapat terangkat sosiointelektualnya dikombinasikan dengan kualitas estetika misalnya (keramahan dan kecantikan) maka hal ini menjadi retorika politik yang menarik untuk. Sehingga di dalam politik, sesuai dengan yang dikatakan norma-norma gender menjadi sangat cair sehingga pendekatan *androgynous* menjadi sangat kentara. Dengan pendekatan *androgynous* maka perempuan dapat masuk ke segala isu dengan lebih mudah, dan memiliki daya tarik yang luar biasa untuk menarik perhatian masyarakat.

Selain itu, dari pengalaman PDIP yang memiliki kisah sukses dalam menggolkan caleg-caleg perempuan ke dalam Parlemen, kita bisa melihat bahwa keberhasilannya sebenarnya dipicu oleh langkah-langkah pragmatis yang dibuat oleh partai, bukan dikarenakan kesadaran perlunya mengarusutamakan kepentingan perempuan di dalam parlemen maupun politik praktis. Hal ini tercermin dari sikap PDIP yang cenderung menawarkan posisi calon legislatif kepada perempuan-perempuan yang memiliki *privilege* di dalam politik; seperti istri kepala daerah atau istri anggota legislatif laki-laki. Kecenderungan ini tentu menandai bahwa persoalan pokok mengenai keterwakilan perempuan sebetulnya belum terjawab tuntas. Karena idealnya, semua perempuan seharusnya memiliki kesempatan yang sama di dalam kontestasi politik.

Namun, hal ini tentu dapat dimaklumi, karena PDIP sendiri yang sudah mewajibkan kuota 30% perempuan pada pengurus partai dari tingkat pusat hingga kecamatan, merasa masih sulit mencari figur perempuan yang siap bertarung di dalam kontestasi politik. Oleh karena itu, ke depannya, pekerjaan rumah bagi partai masih mengenai bagaimana membuat sebanyak mungkin perempuan melek terhadap politik. Oleh karena itu, partai harus semakin

kreatif dalam melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik. Salah satu yang mungkin dilakukan adalah membuat organisasi sayap partai yang khusus berperan dalam meningkatkan peran perempuan. Organisasi ini tentu harus didukung dengan konsep dan kurikulum yang baik, dan juga harus dipastikan dapat menjadi jenjang kader agar para perempuan masuk lebih jauh ke dalam beragam agenda kontestasi politik. Jadi lembaga ini semacam jembatan bagi para politisi perempuan untuk kemudian berdinamika ke level yang lebih luas. Artinya partai kemudian juga harus berkomitmen untuk membuka akses seluas mungkin bagi politisi perempuan, tanpa melihat latar belakangnya.

### **KPU Tersandera Regulasi**

Sementara itu dari sudut pandang KPU sebagai penyelenggara pemilu, terdapat hal yang menarik. Jika mengacu kepada regulasi yang berlaku, maka KPU secara spesifik tidak dapat melakukan banyak terobosan dalam mendorong partisipasi perempuan di dalam kontestasi politik. KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pelaksana Undang-Undang mendorong partisipasi perempuan di dalam pemilu hanya dengan cara-cara umum dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendidikan politik, baik kepada mereka yang akan mencalonkan diri sebagai kandidat peserta, maupun kepada mereka yang akan menjadi calon pemilih.

Menurut Komisioner KPU Sumsel, Hendri Daya Putra, bentuk sosialisasi yang dilakukan antara lain adalah dengan memberikan informasi seluas mungkin di dalam website, juga melalui sosialisasi langsung di tempat-tempat umum dengan mengundang seluas mungkin partisipasi masyarakat. Semua kegiatan ini dilangsungkan sesuai dengan tahapan yang disampaikan oleh KPU pusat, yaitu sejak akhir tahun 2017. Selain itu, dilakukan pula pertemuan-pertemuan dengan partai politik peserta pemilu untuk mengkoordinasikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, terutama mengenai Partai Politik yang harus memenuhi kuota perempuan 30% pada calon legislatifnya dan di setiap ada calon legislatif laki-laki, urutan berikutnya harus calon legislative perempuan.

Hendri juga mengonfirmasi beberapa kendala yang terjadi selama proses pendaftaran calon legislatif, terutama terkait dengan kuota perempuan. Antara lain, kuota perempuan

terpenuhi hanya sekedar untuk memenuhi syarat. Indikasi ini terbaca melalui beberapa kasus seperti: ada temuan beberapa calon legislatif perempuan yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif, tapi tidak melakukan kampanye. Dalam hal ini, tentu KPU tidak bisa berbuat apa-apa.

Lalu, dalam proses verifikasi persyaratan terdapat persyaratan yang belum lengkap. seperti ada beberapa caleg perempuan yang mengundurkan diri, dengan alasan mereka masih terikat jabatan yang melarang mereka untuk menjadi calon legislatif, seperti masih menjadi pegawai BUMN/BUMD. Sebagai contoh menurut Hendri, di OKU Selatan ada salah satu politisi perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, namun ternyata dia masih menduduki jabatan sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Untuk persentasenya sendiri kasus-kasus seperti ini tidak begitu besar.

Secara pribadi Hendri mengatakan bahwa tanpa didorong oleh regulasi, mungkin peran perempuan di dalam perempuan masih agak kurang, tersebut karena faktor budaya patriarki. Menurut Hendri, saat ini semuanya terkesan hanya dipaksa oleh aturan. Sehingga, caleg-caleg perempuan ini kurang berkualitas, karena hanya untuk memenuhi kuota yang dipaksa oleh regulasi.

Dari wawancara ini, dan dengan melihat regulasi yang mengatur KPU, dapat disimpulkan bahwa memang langkah KPU untuk mendorong keterwakilan cukup sulit. Tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur KPU agar membuat program khusus untuk mendorong partisipasi perempuan dalam proses kontestasi politik ini. Sehingga, apabila KPU memang ingin ikut berperan, tentu dengan inisiatif sendiri. Dan tentu, KPU harus secara kreatif mampu memasukkan unsur-unsur yang mendorong keterwakilan perempuan di dalam setiap sosialisasinya.

### **C. Implikasi Riset terhadap Arah Kebijakan**

Penelitian ini memperlihatkan beberapa temuan penting. Pertama, menyangkut adanya peningkatan angka keterwakilan perempuan baik keterwakilan pada daftar calon yang diajukan oleh partai politik maupun keterwakilan calon legislatif terpilih yang berhasil menduduki kursi DPRD periode 2019-2024. Kendatipun demikian, peningkatan ini tidaklah

sangat signifikan karena tetap saja secara proporsi jumlah perempuan yang terpilih dan duduk di DPRD pada periode 2019-2024 ini masih *under representation* yakni di bawah 30 persen. Pertanyaan selanjutnya adalah strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan angka keterwakilan perempuan tersebut pada pemilihan umum mendatang?

Upaya afirmasi terhadap keterwakilan perempuan pada dasarnya telah menjadi suatu upaya panjang terutama sejak era reformasi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk menyeimbangkan keterwakilan perempuan di parlemen. UU Pemilu No. 12 tahun 2003 misalnya telah mengawali upaya afirmasi ini dengan ketentuan perlunya partai politik memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Kemudian UU berikutnya yakni UU Pemilu No. 10/2008 menguatkan terutama pasal 53 yang berbunyi “..daftar bakal calon legislatif memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan”. Bahkan dalam pasal 55 nya dinyatakan bahwa “... di dalam daftar bakal calon dimaksud tersebut, dalam setiap bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon”. Selanjutnya UU Pemilu No. 8 tahun 2012 tetap memuat rumusan afirmatif ini ditambah dengan penguatan melalui PKPU No. 7 tahun 2013 yang mewajibkan partai politik mencalonkan minimal 30 % perempuan di setiap daerah pemilihan. Pemilu 2019 telah dilakukan dan hasilnya menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD namun tetap masih di bawah 30 persen. Upaya afirmatif melalui strategi regulasi oleh KPU pada akhirnya memiliki keterbatasan juga. Otoritas KPU hanya dapat sebatas “memaksa” partai politik untuk mengajukan calon-calonnya namun persoalan apakah calon tersebut dapat maju dan masuk ke parlemen tentu saja menjadi wilayah di luar domain KPU. Keterpilihan calon perempuan pada akhirnya terpulang kepada bagaimana pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik, strategi pemenangan dan juga elektabilitas dari si calon itu sendiri. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa partai politik sendiri telah berupaya untuk tidak hanya mematuhi kuota keterwakilan perempuan tetapi juga berupaya keras melalui pola rekrutmen partai yang tidak hanya sekedar merekrut calon perempuan tetapi juga kualitas elektoral calon melalui pola rekrutmen yang didasarkan pada meritokrasi dan juga partisan. Tapi realitas *under representation* ini tetap saja terjadi oleh berbagai macam faktor. Studi ini hanya terbatas mengamati faktor pola rekrutmen dimana pola meritokrasi berbaur dengan pola

partisan yang lebih banyak didorong oleh motif pragmatisme partai politik. Dalam arti pola apapun yang akan digunakan partai, kemenangan pemilu tetaplah menjadi target utama partai politik. Dengan pragmatisme ini akhirnya rekrutmen lebih banyak disandarkan pada para partisan dan/atau mereka yang memiliki keahlian sekaligus modal politik yang kuat. Walaupun tidak pernah diungkapkan secara terbuka – dan studi ini juga tidak secara khusus menyoroti persoalan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi perempuan untuk aktif dalam partai politik sekaligus masuk dalam pencalonan- namun dengan mudah dapat diduga motif pragmatisme sekaligus merupakan indikasi “ketidakmerataan lapangan permainan” (*unlevel playing field*) yang akan menyulitkan bagi perempuan pendatang baru untuk masuk dalam bursa pencalonan. Faktor pragmatisme partai politik ini tampaknya – jika menyimak dari berbagai studi lain tentang keterwakilan perempuan – saling berkelindan dengan berbagai faktor lain yang menimpa kaum perempuan sehingga menghambat atau pun juga tidak menarik minat perempuan masuk dalam aktivitas politik. Bahkan beberapa studi mengatakan bahwa jumlah kaum perempuan yang terjebak dalam langit-langit kaca (*glass ceiling*) ini cukup dominan. Pada aras partai politik, upaya “*levelling playing field*” sehingga menjamin keterwakilan perempuan dalam rekrutmen calon pada arena partai politik ini tentu saja bukanlah merupakan domain KPU.

Kecuali realitas tersebut, strategi regulasi juga ditantang keefektifannya terutama manakala diskusi tentang keterwakilan perempuan masuk pada diskusi yang lebih substansial. Strategi regulasi semata memberikan jaminan terhadap kuota. Memang kita tidak dapat sepenuhnya mengabaikan bahwa perempuan akan memiliki pengalaman dan minat yang berbeda dibandingkan dengan kaum pria, tapi secara definisi, menjamin keterwakilan perempuan secara deskriptif melalui penggunaan kuota tidak akan menjamin bahwa keterwakilan ini akan diterjemahkan kepada tuntutan politik kaum perempuan oleh perempuan yang menjadi wakil di parlemen. Kuota hanya akan menjamin keterwakilan deskriptif karena tidak ada mekanisme yang memungkinkan dan memaksaperempuan yang telah terpilih menjadi wakil di parlemen harus bertindak secara responsif terhadap kaum perempuan secara kelompok.

Menarik untuk menyimak gugatan Phillips (1995) dalam “Theory of the Politics of Presence” terhadap logika di atas, bagi Phillips perempuan tetaplah pembela politik terbaik bagi kepentingan perempuan. Pandangan ini didasarkan pada anggapannya bahwa perempuan memiliki kepentingan yang berbeda dengan kaum pria disebabkan oleh berbagai pengalaman khas yang hanya mungkin dialami perempuan seperti pelecehan dan kekerasan seksual, ketimpangan situasi sosial ekonomi dan beban memelihara anak (*child-bearing*).

Diskusi di atas menunjukkan bahwa anggapan bahwa perempuan akan mewakili kepentingan dan pengalaman kaum perempuan lainnya sebagai suatu kelompok menyiratkan tentang perlunya pendalaman keterwakilan dari sekedar keterwakilan deskriptif menuju keterwakilan substantif. Walaupun definisi Pitkin tentang keterwakilan substantif tidaklah secara tegas mengecualikan kaum pria misalnya dari kemungkinan bertindak sebagai pembela kepentingan perempuan, dalam pandangan Phillips, perempuan tetaplah pembela yang terbaik karena mereka memiliki minat, kepentingan dan pengalaman bersama yang mungkin tidak mudah dihayati oleh kaum pria.

Jika kebijakan kuota pada akhirnya tetap hanya menjamin keterwakilan deskriptif yang tidak memberikan jaminan apa-apa bahwa kepentingan kaum perempuan akan diperjuangkan apalagi wujud dalam produk-produk legislasi maka yang diperlukan untuk itu adalah upaya meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan. Salah satu upaya peningkatan kualitas keterwakilan ini adalah dengan mendorong dari keterwakilan deskriptif menuju keterwakilan substantif sehingga kepentingan kaum perempuan memang wujud dan lebih bermakna dalam keterwakilan perempuan di legislatif.

Dengan demikian strategi regulasi bukanlah satu-satunya strategi yang mungkin tersedia bagi KPU. Dengan keterbatasan KPU di tengah regulasi yang ada, upaya untuk meningkatkan kualitas keterwakilan perempuan pada pemilu mendatang dapat dilakukan melalui strategi lainnya. Strategi yang paling realistis adalah melakukan strategi pendidikan politik untuk membangun kesadaran politik tentang makna, hakekat dan pentingnya keterwakilan perempuan. Strategi pendidikan politik melalui teknik-teknik kampanye publik atau pun pemasaran sosial boleh jadi akan lebih efektif ketimbang sekedar bermain dengan

regulasi. Untuk itu disarankan KPU mulai melakukan strategi pendidikan politik ini secara inklusif dan kolaboratif dengan berbagai pihak yang terkait dengan membangun kesadaran politik tentang pentingnya keterwakilan perempuan.

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Terdapat jumlah peningkatan calon legislatif perempuan di Sumatera Selatan dari tahun 2014 dan 2019. Secara presentasi, jumlah peningkatan paling tinggi ada di PKB dengan jumlah calon meningkat 2,73% persen dari tahun 2014. Sementara itu penurunan (secara presentase atau bila dibandingkan dengan laki-laki) terjadi di PPP, PAN dan PKS.
- Hasil pemilu juga menunjukkan ada peningkatan calon legislatif terpilih dari tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD Provinsi ada 12 orang sementara pada tahun 2019 ada 16 orang, artinya meningkat 5,3 persen dari tahun 2014. PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah anggota dewan perempuan terbanyak, disusul Golkar dengan 3 perempuan lalu Gerindra, Demokrat, dan PKB masing-masing dua perempuan, dan Nasdem 1 perempuan.
- Rekrutmen partai dilakukan dengan mode meritokrasi dan partisan. Artinya partai memperhitungkan basis massa serta prestasi yang dimiliki oleh kandidat anggota dewan. Selain itu kandidat perempuan umumnya memiliki kekerabatan terhadap partai

terlebih dahulu sebelum bisa masuk dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Sehingga perekrutan perempuan cenderung bersifat pragmatis.

- KPU sulit untuk melakukan terobosan dalam mendorong keterwakilan perempuan, dikarenakan tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Namun semata menyandarkan pada strategi regulasi untuk “memaksa” peningkatan angka keterwakilan juga tidak akan efektif terutama dalam kaitan dengan peningkatan kualitas menuju keterwakilan perempuan yang lebih bersifat substantif daripada keterwakilan deskriptif.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- Kepada KPU dan pihak-pihak terkait untuk dapat merumuskan kebijakan, instrumen, dan perangkat yang mengikat sehingga KPU dapat memiliki otoritas yang luas serta tanggung jawab untuk dapat meningkatkan keterwakilan perempuan.
- Dalam kaitan dengan upaya meningkatkan kuantitas dan juga kualitas keterwakilan perempuan pada pemilu mendatang, disarankan agar KPU dapat mulai mendorong tidak saja peningkatan jumlah keterwakilan (deskriptif) tetapi juga mendorong peningkatan kualitas keterwakilan (substantif) sehingga kepentingan perempuan benar-benar terwakili oleh para perempuan yang mewakili kaumnya di legislatif.
- Upaya itu dapat berupa pendidikan politik melalui metode yang lebih efektif seperti kampanye publik dan pemasaran sosial dengan melibatkan secara inklusif berbagai pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, K. K. 1989. *Man Cannot Speak for Her: Volume II; Key Texts of the Early Feminists*. ABC-CLIO.
- Cholisin, C. 2007. “Karakteristik Kewarganegaraan yang Demokratis dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 4(2).
- Czudnowski, M. M. 1975. “Political Recruitment”. *Handbook of Political Science* volume 2. Halaman 155-242.
- Dahlerup, Drude., 2007. *Women, Quotas and Politics*. London : Routledge
- Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., 1995. *The Sage handbook of Qualitative Research*. Sage.
- Daymon, C. and Holloway, I., 2010. *Qualitative Research Methods in Public Relations and Marketing Communications*. Routledge.
- Edwards, J. L. (Ed.). 2009. *Gender and Political Communication in America: Rhetoric, Representation, and Display*. Lexington Books.
- Geddes, Barbara. 1994. *Politician's Dilemma: Building State Capacity in Latin America* (No. 25). Univ of California Press.
- Gerintya, S. 2017. *Kuota 30% Perempuan di Parlemen Belum Pernah Tercapai*. Retrieved, 7(12), 2018.
- Haris, S. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto. 1982. *Sistem politik: Suatu pengantar*. Liberty.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. 1990. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kellogg, L. D., Gourrier, A. G., Bernick, E. L., & Brekken, K. 2017. *County Governing Boards: Where are all the Women?. Politics, Groups, and Identities*, 7(1), 39-51.
- McClosky, H. 1972. *Political Participation: International Encyclopedia of the social Sciences*.
- Nelli, J. 2015. “Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. (Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau)”. Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 14(2), 254-276.
- Neuman, L.W., 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson.

Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament*. Cambridge University Press.

Panday, P.K. 2008. "Representation without Participation : Quotas for Women in Bangladesh". *International Political Science Review* 29 (4)

Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research and Evaluative Methods*. SAGE.

Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford : Clarendon Press

Pitkin, H.F. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley : University California Press

Riessman, C. 2008. *Narrative Methods for the Human Sciences*. London: Sage.

Sarantakos, S., 2013. *Social Research*. Palgrave Macmillan.

Smith, A. R., Reingold, B., & Owens, M. L. 2012. "The Political Determinants of Women's Descriptive Representation in Cities". *Political Research Quarterly*, 65(2), 315-329.

Subakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia Widiasarana, Jakarta.

Suharno, 2004. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta:Pustaka Obor Indonesia

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Rilis Pers

#### Riset KPUD Sumatera Selatan

#### Keterwakilan Perempuan Meningkat 33 Persen, Sistem Meritokrasi Masih Warnai Pola Rekrutmen

Dibandingkan periode pemilihan anggota legislatif tahun 2014, keterwakilan perempuan meningkat 33 persen. Pada pemilihan legislatif 2014, terdapat 12 perempuan yang menjadi anggota legislatif (aleg) pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada pemilihan aleg 2019, jumlahnya meningkat menjadi 16 aleg perempuan. Persentase peningkatan terbesar dialami oleh aleg perempuan dari PDI-Perjuangan. Bila pada pileg 2014 partai berlogo banteng ini berhasil menempatkan aleg perempuan sebanyak tiga orang, maka pada pileg 2019, jumlahnya menjadi enam aleg perempuan atau meningkat sebesar 100 persen.

Merujuk pada hasil riset *Keterwakilan Perempuan* pada Agustus-September 2019, Kelly Mariana, Ketua KPUD Sumatera Selatan, mengatakan peningkatan ini tak lepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumatera Selatan. Menurut Kelly, peningkatan aleg perempuan itu masih diwarnai oleh pola rekrutmen yang meritokratis. Walau demikian, sesuai hasil riset yang dilakukan, tetap saja ketangguhan dan kejuangan dalam persaingan menjadi faktor yang paling penting. Kelly mengatakan hal ini pada forum FGD *Keterwakilan Perempuan* yang dilakukan di Forum Cafe, Kamis (16/10).

Sebagai contoh, kejuangan dan ketangguhan bertarung dialami oleh RA Anita Noeringhati, aleg perempuan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Anita memulai karir di *trek* yang benar sejak awal. Sejak bergabung di Partai Golkar Sumatera Selatan sekitar 10 tahun lalu, sebagai politisi perempuan, Anita berada di sayap organisasi partai, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Di jalur ini lah karir politik Anita terus menanjak, menjadi aleg dua periode, dan pada periode ketiga ini dia berhasil menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan, tambah Kelly, keberhasilan perempuan Sumatera Selatan juga terlihat dari ajang kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Betul kan, anggota DPD dari Sumatera Selatan seratus persen adalah perempuan,” kata Kelly bangga.

Sebagaimana diketahui, pada pemilihan umum serempak lalu, peraih suara terbanyak anggota DPD dari Sumatera Selatan di dominasi oleh empat perempuan. Mereka adalah Eva Susanti, Amaliah, Jialyka Maharani dan Arniza Nilawati. Tidak satu pun *lanang* dari Sumatera Selatan berhasil menjadi perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil riset yang dilakukan oleh KPUD Sumatera Selatan, bekerja sama dengan *MH Thamrin & Associates*, menemukan adanya peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Sumatera Selatan dari tahun 2014 dan 2019. Secara presentasi, jumlah peningkatan paling tinggi ada di PKB dengan jumlah calon meningkat 2.73% persen dari tahun 2014. Sementara itu penurunan (secara presentase atau bila dibandingkan dengan laki-laki) terjadi di PPP, PAN dan PKS.

Hasil pemilu juga menunjukkan ada peningkatan calon legislatif terpilih dari tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD Provinsi ada 12 orang sementara pada tahun 2019 ada 16 orang, artinya meningkat sebesar 33,3 persen. PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah anggota dewan perempuan terbanyak, disusul Golkar dengan 3 perempuan lalu Gerindra, Demokrat, dan PKB masing-masing dua perempuan, dan Nasdem 1 perempuan.

Rekrutmen partai dilakukan dengan mode meritokrasi dan partisan. Artinya partai memperhitungkan basis massa serta prestasi yang dimiliki oleh kandidat anggota dewan. Selain itu kandidat perempuan umumnya memiliki kekerabatan terhadap partai terlebih dahulu sebelum bisa masuk dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Sehingga perekrutan perempuan cenderung bersifat pragmatis.

KPU sulit untuk melakukan terobosan dalam mendorong keterwakilan perempuan, dikarenakan tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Namun semata

menyandarkan pada strategi regulasi untuk “memaksa” peningkatan angka keterwakilan juga tidak akan efektif terutama dalam kaitan dengan peningkatan kualitas menuju keterwakilan perempuan yang lebih bersifat substantif daripada keterwakilan deskriptif.

***MH Thamrin & Associates*** adalah satu kelompok kerja riset yang ada di Sumatera Selatan. Kelompok ini terdiri dari para ahli dan pengajar bidang studi administrasi publik, pemerintahan, politik, komunikasi dan hubungan internasional.

## Lampiran 2: Dokumentasi Pengumpulan Data



Lampiran 2.1. Wawancara dengan Giri Ramandha Kiemas, Ketua DPD PDIP Sumatera Selatan



Lampiran 2.2 Wawancara dengan Susy Imelda, Caleg Terpilih dari PDIP



Lampiran 2.3. Wawancara dengan Rita Suryani, caleg terpilih dari PDIP



Lampiran 2.4. Wawancara dengan Anita Noeringhati, caleg terpilih dari Golkar

### **Lampiran 3: Laporan Kegiatan Diskusi Diseminasi Hasil Penelitian**

#### **A. Dasar**

Pelaksanaan kegiatan diseminasi ini didasarkan atas amanat Kerangka Acuan Kegiatan Riset Pemilu 2019 dengan topik riset keterwakilan Perempuan yang disusun oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan pelaksanaan risetnya dilakukan oleh Kelompok Kerja Riset M.H. Thamrin & Associates.

Sedangkan dasar hukum kegiatan riset ini sendiri menurut KAKA yang disusun oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan adalah Dasar kegiatan penelitian ini adalah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1976/RT.05-SD/01/KPU/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Pedoman Riset Kepemiluan 2019. Dengan dasar ini KPU Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan riset kepemiluan yang salah satu nya adalah riset ini yang bertopik tentang *Keterwakilan Perempuan*

#### **B. Latar Belakang**

Secara formal amanat KPU sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja kegiatan ini merupakan salah satu alasan yang melatari kegiatan diseminasi ini. Namun secara substansial, pentingnya riset kepemiluan termasuk dan terutama tentang topik Keterwakilan Perempuan merupakan isu strategis dalam peningkatan kualitas pemilu dan sekaligus upaya pendalaman demokrasi sehingga menjadi lebih baik. Bagaimana pemahaman terhadap dinamika keterwakilan perempuan dalam pemilu yang menghasilkan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini tidak saja menarik untuk disimak secara kuantitatif yang berkenaan dengan kecenderungan naik turunnya angka keterwakilan tetapi juga perlu untuk ditelisik dinamika keterwakilannya yang akan memberi manfaat bagi pemahaman yang lebih baik tentang pola keterwakilan mulai dari proses rekrutmen oleh partai politik, kecenderungan dan karakteristik si calon, kondisi geopolitik dan peran dari penyelenggara. Dengan pemahaman tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan implikasi kebijakan.

Mengingat strategisnya isu tentang keterwakilan perempuan ini, maka sudah seyogyanya hasil temuan penelitian ini perlu untuk didiseminasikan pada khalayak yang lebih luas. Upaya diseminasi ini dengan demikian bermakna ganda. Pertama untuk kepentingan kualitas penelitian dimana melalui diseminasi ini dapat diperoleh kritik dan saran yang bermanfaat bagi perbaikan hasil penelitian ini. Kedua, diseminasi hasil riset ini dapat menjadi diskusi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan kesadaran (*awareness*) tentang pentingnya isu keterwakilan perempuan dalam kaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi. Selain dua makna tersebut, diseminasi secara terbuka di hadapan publik dan media sekaligus merupakan ajang akuntabilitas terhadap proses dan temuan penelitian ini.

### **C. Tujuan**

- a. Memaparkan hasil riset pada khalayak luas sehingga diharapkan dapat diperoleh tanggapan dan masukan yang berharga bagi perbaikan kualitas laporan hasil penelitian;
- b. Mengungkit kesadaran (*awareness*) masyarakat secara luas tentang penting dan strategis nya isu keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik secara luas dan dalam DPRD Provinsi Sumatera Selatan secara khusus;
- c. Pertanggungjawaban (akuntabilitas) tim peneliti pada khalayak luas terhadap isu, proses, metode dan hasil temuan penelitian ini.

### **D. Pelaksanaan**

Kegiatan diseminasi hasil penelitian ini dilakukan dalam bentuk diskusi publik yang dilakukan secara terbuka dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. Kecuali itu, dalam diseminasi ini juga mengundang Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk bertindak sebagai narasumber dan pembahas utama.

Kegiatan diskusi diseminasi ini dilakukan pada :

- Hari / Tanggal : Rabu / 16 Oktober 2019  
Pukul : 14.00 s.d 17.00 WIB  
Tempat : Volum Cafe, Jl. Sumpah Pemuda Blok M. No. 7 Palembang

Kegiatan ini telah selesai dilakukan sesuai dengan agenda dan cukup mendapat respon positif yang terlihat dari aktifnya partisipan untuk mengajukan pendapat atau pun pertanyaan. Selain itu publikasi dari berbagai media masa juga memperlihatkan respon yang baik.

### E. Agenda Kegiatan

Agenda Acara Diskusi “Diseminasi Hasil Riset Keterwakilan Perempuan” Palembang, 16 Oktober 2019, Volum Café Resto&Social House	
Waktu	Acara
14.30 – 15.00	Persiapan/Registrasi Peserta
15.00-15.20	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pengantar oleh Pembawa Acara/MC (Annada Nasyaya,S.IP.,M.Si./TVRI Sumsel)</li> <li>○ Menyanyikan Lagu Padamu Negeri</li> <li>○ Sambutan Pengantar sekaligus membuka acara oleh Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra. Kelly Mariana</li> </ul>
15.20-15.45	Paparan Hasil Riset oleh Tim Peneliti (M.H. Thamrin, Bagindo Togar Butar Butar, Aris Munandar, Oemar Madri Bafadhal, Ferdiansyah, Gunawan) dengan dipandu oleh Moderator Annada Nasyaya, S.IP, M.Si
15.00-15.45	Pembahasan dan Tanggapan Narasumber : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan (Dra. Kelly Mariana)</li> <li>● Ketua DPRD Provinsi Sumsel periode 2019-2024 (R.A. Anita Noeringhati, S.H.,M.Hum)</li> </ul>
15.45-16.30	Diskusi dan Tanya Jawab
16.30-18.00	Wrap Up <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kesimpulan Penutup (<i>Concluding Remarks</i>) dan sekaligus Penutupan Acara               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ketua KPU Provinsi Sumsel</li> <li>● Ketua DPRD Provinsi Sumsel</li> <li>● Ketua Tim Peneliti</li> </ul> </li> <li>● Menyanyikan Lagu Wajib “Indonesia Pusaka”</li> <li>● Ramah Tamah</li> </ul>

## F. Partisipan

Kegiatan diseminasi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang secara umum terdiri dari :

- a. Partai Politik (Golkar, PDIP, PAN, Demokrat) ;
- b. Media massa yang tergabung dalam Forum Jurnalis Parlemen dan Ikatan Wartawan Online (IWO);
- c. Ketua dan Komisioner KPUD Provinsi Sumatera Selatan;
- d. Ketua dan staf DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Kelompok dan Organisasi Aktivistis Perempuan;
- f. Aktivistis Demokrasi Sumsel Bersatu;
- g. Mahasiswa FISIP Unsri
- h. Lembaga Pers Mahasiswa
- i. Khalayak luas



Lampiran 3.1. Banner Diseminasi



Lampiran 3.2. Diseminasi Hasil Penelitian (16 Oktober 2019)



Lampiran 3.3. Peneliti sedang Memaparkan Hasil Penelitian



Lampiran 3.4. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan; Kelly Mariana memberikan pemaparan



Lampiran 3.5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan RA. Anita Noeringhati memberikan paparan



Lampiran 3.6.  
Peserta Diseminasi sekaligus narasumber mendiskusikan hasil penelitian



Lampiran 3.7. Wartawan dari berbagai media  
memberikan pendapat tentang keterwakilann perempuan

Lampiran 4. Daftar Hadir Kegiatan Diseminasi



KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis / 16 Oktober 2019  
 Pukul : 14.00 WIB S.D 17.00 WIB  
 Acara : Diskusi Diseminasi

NO.	NAMA	KETERANGAN	Tanda tangan
1			1.....
2			2.....
3	Amurah m	Kpu Sumsel	3.....
4	IDA UTAMI, M.Pi	Dosen. STIASP Adis	4.....
5	NUNIK HANDAYANI	FITRA SUMSEL	5.....
6	ARI MELATI	WCC PALEMBANG	6.....
7	Jean Fitria	Radio Elshinta	7.....
8	Mate	INTENS-NEWS	8.....
9	Tomy Sidham	IKA FISIP	9.....
10	Syahrin Supran	AMPI Sumsel	10.....
11	Bony	Banyo	11.....
12	Summa Hidayat	AGS	12.....
13	Johannes Firano	ASB.	13.....
14	B. Suzanna L.	DPW GLAN Sumsel	14.....
15	Jon Morino		15.....
16			16.....
17	Banleg	LSI Sumsel	17.....
18	CON WAZ	INTENS-NEWS	18.....
19			19.....
20			20.....
21			21.....
22			22.....
23			23.....
24			24.....
25			25.....



**KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal

Pukul

Acara

: Kamis / 16 Oktober 2019

: 14.00 WIB S.D 17.00 WIB

: Diskusi Diseminasi

NO.	NAMA	KETERANGAN	Tanda tangan
1	Dra. Kelly Mariana		1.....
2	Hendri Alma W. M.Pd.		2.....
3	Hepryadi, S.H. M.H		3.....
4	Amrah Muslimin, S.E.M.Si	Kepu sumsel	4.....
5	NUNIK HANDAYANI	FITRA SUMSEL	5.....
6	Jeane Fitra	PATRO ELSEKTER	6.....
7	Nara	INTENS-NEWS	7.....
8	IDA UTAMI, Mfi	Doen, BDR&P AdS	8.....
9	Tomy Sidham	IKAPISIP	9.....
10	Sugiran Supriano	AMRI. Sumsel	10.....
11	Dedy	Beranggr.	11.....
12	Galima Flo Dafat	ASB	12.....
13	Johannes Firono	ASB	13.....
14	B. Suzanna L.	DPW GIAN SUMSEL	14.....
15	Jon Morino		15.....
16	ATRS	Nelle Sersl.	16.....
17	Bambang	LSI sumsel-bata	17.....
18	oan user	Intens. news	18.....
19			19.....
20			20.....
21	Fikrento	Bolitaman	21.....
22	Anita.	staf kepu prov sumsel	22.....
23	Herlis Miyana,	"	23.....
24	Sulaiman Purnama	"	24.....
25	Indah Dwita	"	25.....



**KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DAFTAR HADIR**

Hari / Tanggal

: Kamis / 16 Oktober 2019

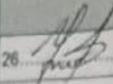
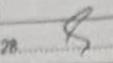
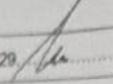
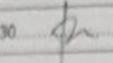
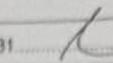
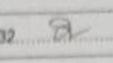
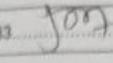
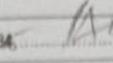
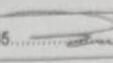
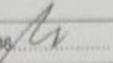
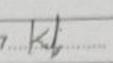
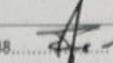
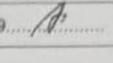
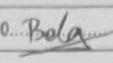
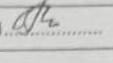
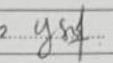
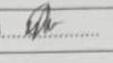
Pukul

: 14.00 WIB S.D 17.00 WIB

Acara

: Diskusi Diseminasi

NO.	NAMA	KETERANGAN	Tanda tangan
1	Mari P	Protokol Dred prov St	1. Mari P
2	Wahyuni Nugraha	H	2. Wahyuni Nugraha
3	Tegri Rosa D	"	3. Tegri Rosa D
4	Ida Utami, Mbi	Dosen - STAZP AdS	4. Ida Utami, Mbi
5	NUNIK HANDAYANI	FITRA SUMSEL	5. NUNIK HANDAYANI
6	ARIE MELATI	WCC Palembang	6. ARIE MELATI
7	Jeanne Fritia	Radio Elshinta	7. Jeanne Fritia
8	Nata	INTENS-NEWS	8. Nata
9	Tommy Sidhuan	IKA FISIP	9. Tommy Sidhuan
10	Supran Supran	AMPI Punduh	10. Supran Supran
11	Benny	Berus Ber	11. Benny
12	Kulna Kodya	ASB	12. Kulna Kodya
13	Johannes Firro	ASB	13. Johannes Firro
14	B. Susanna L.	DPW GIAN Sumsel	14. B. Susanna L.
15	Jon Marno		15. Jon Marno
16			16. [Signature]
17	Bambang	LSI Sumsel	17. Bambang
18	oom usip	micro.news	18. oom usip
19			19. ....
20			20. ....
21			21. [Signature]
22			22. ....
23			23. ....
24			24. ....
25			25. ....

NO.	NAMA		Tanda tangan
26	IWAN SAPUTRA	Sundeltoday.com	26..... 
27	Andy putrany	matheus.co	27..... 
28	SRIE Gumay	Sumatarnews.co.id	28..... 
29	Iwan	Suwarnanews	29..... 
30	FAFIE	SRIPA	30..... 
31	BAR	IND	31..... 
32	ARIE	TRIBUN	32..... 
33	Anton.	Koranca-Gem/SN	33..... 
34	IDA RURI SUKAWATI	SEKOLAH KEMERDEKAAN PREMIER ZILENGI	34..... 
35	Zarkasi	Radar PLC	35..... 
36	FUCIUS	REKTA	36..... 
37	Koti Juliana S. Lam	Ciwan/ATPIPI	37..... 
38	Hj. Nurhidayah S.Sis	PAN	38..... 
39	Asei	Summa Sumed Nas	39..... 
40	PABELA OKTARIMA	KPU Prov. Sumsel	40..... 
41	Alma Marni	Pemuda	41..... 
42	Ismi Hanna	kpu prov. Sumsel	42..... 
43	DEBAY PRATIWI	kpu Prov. Sumsel	43..... 
44			44.....
45			45.....
46			46.....
47			47.....
48			48.....
49			49.....
50			50.....

## Lampiran 5. Kumpulan Berita Diseminasi Riset Keterwakilan Perempuan



Home POLITIK PALEMBANG Daerah Ekonomi & Bisnis Pemerintahan Pendidikan Advertorial Majalah Budaya Tentang

Berita

Cari Berita

/ Politik / Perempuan Masih Butuh Pendidikan Politik

### POLITIK

## Perempuan Masih Butuh Pendidikan Politik

Rabu, 16 Okt 2019 17:20 | 234



Lentera-PENDIDIKAN.com,PALEMBANG-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel menilai, perempuan masih membutuhkan pendidikan politik yang dilakukan secara kontinyu dan masiv. Hingga keterwakilan perempuan di kursi legislatif dapat meningkat, meski pada pemilu legislatif 2019 jumlah perempuan terpilih menjadi anggota dewan terjadi peningkatan.

Hal ini dikatakan Ketua KPU Provinsi Sumsel Kelly Mariana dalam acara hasil riset pemilu serentak 2019 untuk caleg provinsi Sumsel oleh MH Thamrin Associates, di Volum Cafe Resto & Social House, Rabu (16/10/2019) sore.

"Kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan pileg 2019 memang termasuk regulasi baru. Tapi partai politik sudah memenuhi syarat tersebut untuk lolos jadi peserta pileg 2019. Akan tetapi, di masyarakat masih menganggap bahwa perempuan yang mencalonkan diri masih dianggap belum mampu berpolitik," jelas Kelly.

Oleh karena itu, menurutnya penting dilakukan pendidikan politik untuk masyarakat agar perempuan tidak hanya dianggap bisa mengurus masalah yang umum saja. Namun juga mampu ikut serta berpolitik.

"Tapi, PR nya sekarang calon perempuan juga harus punya strategi bagaimana agar masyarakat bisa percaya untuk memilihnya di kontestasi pileg," katanya.

Dibandingkan dengan 2014, ternyata di Pileg 2019 sudah ada kenaikan akan keterwakilan perempuan di parlemen provinsi Sumsel.

"2014 kemarin jumlah kaum perempuan yang terpilih ada 12 orang. Sementara di tahun 2019 ada 16 orang perempuan yang terpilih. Ini artinya sudah ada peningkatan lebih kurang 20 persen. Mungkin untuk kontestasi berikutnya caleg perempuan harus bisa merebut kepercayaan masyarakat agar memilih kaum perempuan," ujarnya.

Terpisah, Direktur MH Thamrin Associates, Dr MH Thamrin mengatakan meningkatnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif terjadi secara alamiah akibat makin banyaknya perempuan yang ikut dalam kontestasi Pileg 2019.

"Memang angka kenaikannya tidak terlalu besar, karena yang terpilih kebanyakan caleg perempuan yang punya track record baik," ujarnya.

Masalah yang terjadi, kata dia, perempuan yang terpilih dan duduk di kursi legislatif belum sepenuhnya menjadi wakil dari kaum perempuan.

"Padahal banyak hal yang bisa diperjuangkan dalam kaitannya keterwakilan perempuan ini. Mungkin dengan mendengarkan aspirasi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bisa menjadi faktor pemicu kenaikan keterwakilan perempuan. Kita lihat saja pengabdian ke masyarakat dari kaum perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif di Sumsel," tukasnya.

Penulis : redaksi  
Editor : Muhlis,ST  
Tag : Politik

Lampiran 5.1 Artikel di Lentera Pendidikan (<https://bit.ly/2BFYix8>)

## Keterwakilan Perempuan Meningkat 33 Persen. Sistem Meritokrasi Masih Warnai Pola Rekrutmen

Rabu, 16 Oktober 2019 21:21



Ketua DPRD Sumsel H RA Anita Noerenghati SH MH didampingi Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana dan Direktur MH Thamrin Associates, Dr MH Thamrin pada Diskusi hasil riset pemilu serentak 2019 untuk calon provinsi Sumsel oleh MH Thamrin Associates, di Volum Cafe Resto & Social House, Rabu (16/10/2019).

**Keterwakilan Perempuan Meningkat 33 Persen.  
Sistem Meritokrasi Masih Warnai Pola Rekrutmen**

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Dibandingkan periode pemilihan anggota legislatif tahun 2014, keterwakilan perempuan meningkat 33 persen. Pada pemilihan legislatif 2014, terdapat 12 perempuan yang menjadi anggota legislatif pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan pada pemilihan anggota legislatif 2019, jumlahnya meningkat menjadi 16 aleg perempuan. Peningkatan terbesar dialami oleh aleg perempuan dari PDI Perjuangan. Bila pada pileg 2014 partai berlogo banteng ini berhasil menempatkan aleg perempuan sebanyak tiga orang, maka pada pileg 2019, jumlahnya menjadi enam aleg perempuan atau meningkat sebesar 100 persen.

Merujuk pada hasil riset Keterwakilan Perempuan pada Agustus-September 2019, Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana, mengatakan peningkatan ini tak lepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumatera Selatan.

"Peningkatan aleg perempuan itu masih diwarnai oleh pola rekrutmen yang meritokratis. Walau demikian, sesuai hasil riset yang dilakukan, tetap saja ketangguhan dan kejuangan dalam persaingan menjadi faktor yang paling penting," ungkap Kelly pada forum FGD Keterwakilan Perempuan yang dilakukan di Volum Cafe, Kamis (16/10).

Sebagai contoh, kejuangan dan ketangguhan bertarung dialami oleh HJ RA Anita Noerenghati SH MH, aleg perempuan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Anita memulai karir di trek yang benar sejak awal. Sejak bergabung di Partai Golkar Sumatera Selatan sekitar 10 tahun lalu, sebagai politisi perempuan, Anita berada di sayap organisasi partai, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Di jalur ini lah karir politik Anita terus menanjak, menjadi aleg dua priode, dan pada priode ketiga ini dia berhasil menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan, tambah Kelly, keberhasilan perempuan Sumatera Selatan juga terlihat dari ajang kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

[Halaman selanjutnya →](#)

Halaman [1](#) [2](#)

Lampiran 5.2 Artikel di Tribunnews Palembang  
(<https://bit.ly/2MMuPaW>)



Home / Politik dan Pemerintahan / Kepercayaan Masyarakat Pengaruhi Keterwakilan Perempuan di Parlemen

## KEPERCAYAAN MASYARAKAT PENGARUHI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

Awid Durrohman • 1 minggu ago • Politik dan Pemerintahan • 91 Tampilan



Ketua DPRD Sumsel Anita Noerihati memberikan paparannya saat menjadi narasumber pada acara pemaparan hasil riset pemilu serentak 2019 untuk caleg Provinsi Sumsel oleh MH Thamrin Associates. (foto-anton/koransn)

Palembang, KoransN

Pendidikan politik di masyarakat masih perlu dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Di lain pihak, calon legislatif (Caleg) perempuan juga harus mempunyai strategi untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Provinsi Sumsel Kelly Mariana dalam pemaparan hasil riset pemilu serentak 2019 untuk caleg Provinsi Sumsel oleh MH Thamrin Associates, di Volum Cafe Resto & Social House, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, meski pada pemilu legislatif 2019 ini jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Sumsel mengalami peningkatan dari 12 orang pada pemilu 2014 menjadi 16 pada pemilu 2019, namun jumlah itu dinilai belum terlalu signifikan.

### Baca Juga : [Cawawako Harus Berjwa Pemimpin](#)

"Masyarakat masih menganggap bahwa perempuan yang mencalonkan diri masih belum mampu berpolitik," kata Kelly.

"PR nya sekarang calon perempuan juga harus punya strategi bagaimana agar masyarakat bisa percaya untuk memilihnya di kontestasi pilleg," katanya menambahkan.

Terpisah, Direktur MH Thamrin Associates, Dr MH Thamrin mengatakan meningkatnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif terjadi secara alamiah akibat makin banyaknya perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilleg 2019.

"Memang angka kenaikannya tidak terlalu besar, karena yang terpilih kebanyakan caleg perempuan yang punya track record baik," ujarnya.

### Baca Juga : [2018. MotoGP Bakal Digelar di Palembang](#)

Masalah yang terjadi, kata dia, perempuan yang terpilih dan duduk di kursi legislatif belum sepenuhnya menjadi wakil dari kaum perempuan.

"Padahal banyak hal yang bisa diperjuangkan dalam kaitannya keterwakilan perempuan ini. Mungkin dengan mendengarkan aspirasi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bisa menjadi faktor pemicu kenaikan keterwakilan perempuan. Kita lihat saja pengabdian ke masyarakat dari kaum perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif di Sumsel," pungkasnya.

Sementara itu, Caleg perempuan DPRD Sumsel terpilih yang kini menjabat Ketua DPRD Sumsel Anita Noerihati mengakui, butuh perjuangan yang tidak mudah bagi kaum perempuan untuk masuk dalam dunia politik.

"Belum lagi setelah duduk di parlemen, perempuan juga harus membuktikan kinerjanya kepada masyarakat," pungkasnya. (awj)

Lampiran 5.3 Artikel di Koran Suara Nusantara  
(<https://bit.ly/32PDG19>)

Cari Berita

dik:top-header-second 777 - 47

**SWARNA NEWS**  
Jurnal & Politik

 Asih Wahyu Rini  
Redaktur Pelaksana

Menu

**STOP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**  
MAJU BERKAMA, KITA CIGAR BERKAMA HUTAN DAN LAHAN  
"Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita"

**SELAMAT DAN SUKSES**  
TELAH DILAKUKAN PIMPINAN DPRD  
DAN TERBENTUKNYA ALAT KEGIATAN DPRD KAB. BOJALE  
"BERKERJA BERSAMA MENJAU MUDA MAJU BERKATA 2020"

Homepage / Kota Palembang Buti Kani

## Keterwakilan Perempuan Meningkat 33 Persen PDI P Sumbang 100 Persen



16 OKTOBER 2019



SWARNANEWS.CO.ID, PALEMBANG – Dibandingkan periode pemilihan anggota legislatif (Aleg) tahun 2014, keterwakilan perempuan meningkat 33 persen. Pada pemilihan legislatif 2014, 12 perempuan yang menjadi anggota DPRD Sumsel. Sedangkan, tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 16 Aleg.

Persentase peningkatan terbesar di alami oleh Aleg Perempuan dari PDI Perjuangan Tahun 2014 partai berlogo banteng ini berhasil menempatkan Aleg perempuan sebanyak tiga orang dan tahun 2019, menjadi enam Aleg perempuan atau meningkat sebesar 100 persen.

Merujuk hasil riset keterwakilan pada Agustus- September 2019, Kelly Mariana, Ketua KPUD Sumsel, mengatakan peningkatan ini tak terlepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumsel.

Menurut Kelly, peningkatan Aleg perempuan itu masih diwarnai oleh pola rekrutmen yang meritokrasi. Walau demikian, sesuai hasil riset yang dilakukan, tetap saja ketangguhan dan kejuangan dalam persaingan menjadi faktor penting. Bahkan keberhasilan perempuan Sumsel terlihat dari ajang kontestasi DPD.

**BACA JUGA** [Polda Suparna Bahinsa Keramil 418-02/ Pakjo, Amankan Pencuri dari Amukan Warga](#)

\* Betulkan, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Selatan Seratus persen adalah perempuan," kata Kelly, pada Forum FGD Keterwakilan Perempuan yang dilakukan di Volum Cafe, Kamis (16/10).

Sementara hasil riset dilakukan KPUD Sumsel bekerjasama dengan MH Thamrin dan Associates penemuan adanya peningkatan jumlah Caleg perempuan di Sumsel dari tahun 2014 dan 2019. Secara persentase, jumlah peningkatan paling tinggi ada di PKB jumlah calon meningkat 2,73 persen di tahun 2014, sementara itu penurunan terjadi di PPP, PAN dan PKS.

"KPU sulit untuk melakukan terobosan dalam mendorong keterwakilan perempuan, dikarenakan tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut," jelasnya.

**BACA JUGA** [Palresta Palembang musnahkan ribuan hotel miras](#)

Ditempat sama, Dr Muhammad Husni Thamrin mengatakan, meningkatnya perwakilan perempuan secara alamiah diakibatkan rata-rata keterlibatan di dalam dunia politik. Namun, angka kenaikan itu tidak begitu besar.

Dari hasil penelitian melihat ada semacam kecenderungan perwakilan perempuan terpilih calon-calon yang memang sudah partisipan. Persoalannya, apakah calon terpilih ini bisa mewakili untuk perempuan, inilah yang menjadi tanda tanya besar untuk dilakukan pembuktian.

"Nanti bisa dilihat calon-calon terpilih ini untuk membuktikan di tahun pengabdian berikutnya. Mudah-mudahan dapat membela kaum perempuan, paling tidak secara politik karena adanya kebijakan kuota bisa dijadikan perwakilan secara diskritif," katanya.

"Untuk perwakilan terpilih perempuan mencapai 30 persen sampai saat ini belum tercapai," tandasnya.

Teks Iwan  
Editor : Asih

Share on:

 WhatsApp

Lampiran 5.4 Artikel di Swarna News  
(<https://bit.ly/2qNwGUD>)



Home / Headline / Keterwakilan Perempuan Meningkat 33 Persen di Sumsel

### Keterwakilan Perempuan Meningkat 33 Persen di Sumsel

10 Oktober 2019 10:28 WIB



BFYLDJY OSKANDAR/FGD Keterwakilan Perempuan yang dilakukan di Volum Cafe, Kamis (10/10).

**Palembang, BP**—Dibandingkan periode pemilihan anggota legislatif tahun 2014, keterwakilan perempuan di Sumatera Selatan meningkat 33 persen. Pada pemilihan legislatif 2014, terdapat 12 perempuan yang menjadi anggota legislatif (aleg) pada DPRD Sumsel.

Sedangkan pada pemilihan aleg 2019, jumlahnya meningkat menjadi 16 aleg perempuan. Persentase peningkatan terbesar dalam aleg perempuan dari PDI Perjuangan. Bila pada pilleg 2014 partai berlogo banteng ini berhasil menempatkan aleg perempuan sebanyak tiga orang, maka pada pilleg 2019, jumlahnya menjadi enam aleg perempuan atau meningkat sebesar 100 persen.

Menyik pada hasil riset Keterwakilan Perempuan pada Agustus-September 2019, Kelly Mariana, Ketua KPU Sumsel, mengatakan peningkatan ini tak lepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumatera Selatan. Menurut Kelly, peningkatan aleg perempuan itu masih diwarnai oleh pola rekrutmen yang meritokratis. Walau demikian, sesuai hasil riset yang dilakukan, tetap saja ketanggahan dan kejuangan dalam persaingan menjadi faktor yang paling penting. Kelly mengatakan hal ini pada forum FGD Keterwakilan Perempuan yang dilakukan di Volum Cafe, Kamis (16/10).

"Sebagai contoh, kejuangan dan ketanggahan bertaruh dialami oleh RA Anita Noerhingshi, aleg perempuan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan," katanya.

Anita memulai kari di trek yang benar sejak awal. Sejak bergabung di Partai Golkar Sumatera Selatan sekitar 10 tahun lalu, sebagai politis perempuan, Anita berada di sayap organisasi partai, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Di jalur inilah kari politik Anita terus menanjak, menjadi aleg dua periode, dan pada periode ketiga ini dia berhasil menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan, tambah Kelly, keberhasilan perempuan Sumatera Selatan juga terlihat dari ajang kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

"Betul kan, anggota DPD dari Sumatera Selatan seratus persen adalah perempuan," kata Kelly bangga.

Sebagaimana diketahui, pada pemilihan umum serempak lalu, peran suara terbanyak anggota DPD dari Sumatera Selatan didominasi oleh empat perempuan. Mereka adalah Eva Suaanti, Amaliah, Jalyka Maharani, dan Anizza Nilawati. Tidak satu pun lanang dari Sumatera Selatan berhasil menjadi perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan.

Hasil riset yang dilakukan oleh KPU Sumatera Selatan, bekerja sama dengan MH Thamrin & Associates, memetakan adanya peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Sumatera Selatan dari tahun 2014 dan 2019. Secara persentase, jumlah peningkatan paling tinggi ada di PKS dengan jumlah calon meningkat 2,73% persen dari tahun 2014. Sementara itu penurunan (secara persentase atau bila dibandingkan dengan laki-laki) terjadi di PPP, PAN, dan PKS.

Hasil pemilu juga menunjukkan ada peningkatan calon legislatif terpilih dari tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2014 jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD Provinsi ada 12 orang sementara pada tahun 2019 ada 16 orang, artinya meningkat sebesar 33,3 persen. PDI Perjuangan mengukir partai dengan jumlah anggota dewan perempuan terbanyak, disusul Golkar dengan tiga perempuan, lalu Gerindra, Demokrat, dan PKB masing-masing dua perempuan, dan Nasdem.

Sedangkan rekrutmen partai dilakukan dengan mode meritokrasi dan partisan. Artinya partai memperhitungkan basis massa serta prestasi yang dimiliki oleh kandidat anggota dewan. Selain itu kandidat perempuan umumnya memiliki kekerabatan terhadap partai terlebih dahulu sebelum bisa masuk dan mendaftarkan diri sebagai calon legislatif. Sehingga perekrutan perempuan cenderung bersifat pragmatis.

KPU silih silih melakukan tesoban dalam mendorong keterwakilan perempuan, dikarenakan tidak adanya regulasi yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Namun semata menyandarkan pada strategi regulasi

Untuk "memaksa" peningkatan angka keterwakilan juga tidak akan efektif terutama dalam kaitan dengan peningkatan kualitas menuju keterwadahan perempuan yang lebih bersifat substantif daripada keterwakilan deskriptif.

Direktur MH Thamrin Associates Dr MH Thamrin mengatakan meningkatnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif terjadi secara alamiah akibat makin banyaknya perempuan yang ikut dalam kontestasi Pilleg 2019.

"Memang angka kenaikannya tidak terlalu besar, karena yang terpilih kebanyakan caleg perempuan yang punya track record baik," ujarnya.

Masalah yang terjadi, kata dia, perempuan yang terpilih dan duduk di kursi legislatif belum sepenuhnya menjadi wakil dari kaum perempuan.

"Padahal banyak hal yang bisa diperjuangkan dalam kaitannya keterwakilan perempuan ini. Mungkin dengan mendengarkan aspirasi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bisa menjadi faktor pemicu kenaikan keterwakilan perempuan. Kita lihat saja pengabdian ke masyarakat dari kaum perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif di Sumsel," katanya.

Ketua DPRD Sumsel sementara Hj RA Anita Noerhingshi mengatakan, sebelum masuk dunia politik dia adalah penacara yang banyak membantu masyarakat kecil. Saat menjadi anggota DPRD Sumsel pertama kali tahun 2009 untuk dapil Palembang dari Partai Golkar bersama Mishla dari Partai Demokrat.

Lalu kembali menjadi anggota DPRD Sumsel dapil Palembang di periode 2014-2019 lalu periode 2019-2024 kembali masuk dewan.

"Saya sudah punya basis dari orang-orang yang saya bantu waktu jadi penacara," katanya sembari mengatakan, dalam sejarah DPRD Sumsel baru sekali dipan Ketua DPRD dari kalangan perempuan yaitu dirinya.

Selain itu menurutnya di periode kali ini kaum perempuan banyak duduk di DPRD Sumsel terutama dari PDIP. **fwk**

Lampiran 5.5 Artikel di Berita Pagi  
(<https://bit.ly/2Wd0J3w>)

## Pileg 2019, Caleg Perempuan Naik 33 Persen

Suryadinata — Diterbitkan Pada 16 Okt 2019, 16:47 WIB



Foto : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Kelly Mariana (Suryadinata)

Bagikan 19 0

**Intens.news, PALEMBANG –** Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, Kelly Mariana mengatakan, keterwakilan kaum perempuan duduk dikursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2019 meningkat 33 persen.

"Pada pemilihan legislatif tahun 2014 terdapat 12 perempuan yang menjadi caleg di DPRD Sumsel, dan pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 16," katanya saat acara diakhiasi keterwakilan perempuan di Volum Cafe and Resto, Rabu (16/10/2019).

Dijelaskan Kelly, untuk presentase peningkatan terbesar dialami oleh Caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

"Tahun 2014 kemarin partai berlogo banteng ini berhasil menempatkan 3 orang caleg, dan di tahun 2019 ini ada 6 caleg, artinya untuk caleg perempuan dari PDIP saja meningkat 100 persen," jelasnya.

### BACA JUGA

Ketua DPRD Sumsel Ajak Masyarakat Hormati Pelantikan...

Suryadinata • 17 Okt 2019, 12:06 WIB 16



Maret 2020, KPU Sumsel Lantik PPK dan PPS

Suryadinata • 17 Okt 2019, 11:42 WIB 14



Merasa Terpanggil, Birokrat asal Desa Tempirai Daftar Cabup...

Budi Suwarno • 15 Okt 2019, 14:06 WIB 204



Ofi dan Panca Mawardi Yahya Slap Maju Pilkada Ogan Ilir 2020

Redaksi • 14 Okt 2019, 13:52 WIB 74



Selain partai PDIP, ia mengungkapkan tahun 2014-2019 masih ada peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Sumsel. Secara presentasi jumlah peningkatan tertinggi ada di PKB dengan jumlah calon meningkat 2.73 persen.

"Ini hasil riset KPUD Sumsel bekerja sama dengan MH Thamrin dan Associates. Secara presentase untuk penurunan kaum laki-lakinya terjadi di partai PPPAN dan PKS," ungkapnya.

Merujuk pada hasil riset keterwakilan perempuan pada bulan Agustus – September 2019, Kelly menuturkan, peningkatan tersebut tak lepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumsel.

"Peningkatan caleg perempuan ini masih diwarnai pola rekrutmen yang meritokratis. Sesuai riset yang dilakukan, tetap saja ketangguhan dan kejuangan dalam persaingan yang menjadi faktor terpenting," terangnya.

Editor : Rian

Lampiran 5.6 Artikel di Intens News  
(<https://bit.ly/2Wdv5D4>)

Fanspage



Like Page

Be the first of your friends to like this

**TEMPOREAL** Peson Tegag Presiden RI Jokowi di Sidang Paripurna Perdana Kabinet.

Home > Politik > KPU Sumsel: Keterwakilan Perempuan di Legislatif Meningkat

**MULTI**  
**KPU Sumsel: Keterwakilan Perempuan di Legislatif Meningkat**



RABU, 14 OKTOBER 2019 - 19:32 15.53K

Share Tweet Share

**TIMESINDONESIA, PALEMBANG** - Riset Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Selatan (KPUD Sumsel) menyatakan keterwakilan perempuan pada Pemilu 2019 meningkat 33 persen jika dibandingkan periode pemilihan anggota legislatif tahun 2014.

**BACA JUGA**

- TIMES Indonesia Luncurkan Iduldes untuk Masyarakat 5.0 (4/10)
- Koalisi dan Agenda Besar Dibalik Idol Show Menteri ala Jokowi
- Zainur Touhid Jadi Wakil Menag, PPP: Sesuai Portofolio Bidang Keagamaan
- Ketua Umumnya Ditunjuk Jadi Wakil Menteri Desa, Projo Tak Jadi Bubur
- DPD Nasdem Kabupaten Malang, Terima Lima Pendaftar Calon Bupati Malang

Berdasarkan data pada pemilihan legislatif 2014, terdapat 12 perempuan yang menjadi anggota legislatif (caleg) DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pada pemilihan caleg 2019, jumlahnya meningkat menjadi 16 caleg perempuan.



"Persentase peningkatan terbesar dialami oleh anggota legislatif perempuan dari PDI Perjuangan," kata Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana di acara FGD KPU Sumsel bersama MH Thamrin Associates, Rabu (16/10/2019) di Volum Coffe Social House.

Bila pada pileg 2014 partai berlogo banteng ini berhasil menempatkan anggota legislatif perempuan sebanyak tiga orang, maka pada pileg 2019, jumlahnya menjadi enam caleg perempuan atau meningkat sebesar 100 persen.

Kelly Mariana mengatakan peningkatan ini tak lepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumatera Selatan.

Menurut Kelly, peningkatan caleg perempuan itu masih diwarnai oleh pola rekrutmen yang meritokratis. "Walaupun demikian, sesuai hasil riset yang dilakukan, tetap saja ketanggahan dan kejuangan dalam persaingan menjadi faktor yang paling penting," ujar Alumni FISIP Unsrri ini.

Salah satunya pembicara, RA Anita Noeringhati adalah salah satu caleg perempuan 'tanggung' yang kini menjabat Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Dalam catatan TIMES Indonesia, sosok RA Anita Noeringhati bukan asli Palembang melainkan perempuan asal Solo. Namun dia mampu membuktikan bahwa dia bisa eksis di Sumsel.

Anita memulai karir politiknya bergabung di Partai Golkar Sumatera Selatan sekitar 10 tahun lalu, sebagai politisi perempuan, Anita berada di sayap organisasi partai, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG).

Di jalur inilah karir politik Anita terus menanjak, menjadi anggota DPRD Sumsel dua priode, dan pada periode ketiga ini dia berhasil menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Keberhasilan perempuan Sumatera Selatan juga terlihat dari ajang kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota DPD dari Sumatera Selatan seratus persen adalah perempuan. Mereka adalah Eva Susanti, Amaliah, Jialyka Maharani dan Arniza Nilawati.

Berdasarkan riset KPU Sumsel yang bekerja sama dengan MH Thamrin & Associates itu, juga ditemukan peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Sumatera Selatan dari tahun 2014 dan 2019.

Secara persentasi, jumlah peningkatan paling tinggi ada di PKB dengan jumlah calon meningkat 2.73% persen dari tahun 2014. Sementara itu penurunan (secara presentase atau bila dibandingkan dengan laki-laki) terjadi di PPP, PAN dan PKS.

Menurut riset **KPUD Sumsel** juga, hasil pemilu 2019 juga menunjukkan ada peningkatan calon **legislatif** terpilih dari tahun 2014 dan 2019. PDI Perjuangan merupakan partai dengan jumlah anggota dewan **perempuan** terbanyak, disusul Golkar dengan 3 perempuan lalu Gerindra, Demokrat, dan PKB masing-masing dua perempuan, dan Nasdem 1 perempuan. (\*)

# KPU SUMSEL # PEREMPUAN # LEGISLATIF

Lampiran 5.7 Artikel di Times Indonesia (<https://bit.ly/2BFM5sj>)



BY LPLIMAS - OCTOBER 16, 2019



Dok. Pribadi

Palembang, lplimas.id – Merujuk pada hasil riset keterwakilan perempuan pada Agustus–September 2019, Kelly Mariana, Ketua KPUD Sumatera Selatan, mengatakan peningkatan anggota legislatif (aleg) perempuan tidak lepas dari sistem dan pola rekrutmen partai politik di Sumatera Selatan. Menurut beliau, peningkatan aleg perempuan masih diwarnai oleh pola rekrutmen yang meritokratis. Walau demikian, sesuai hasil riset yang dilakukan, tetap saja ketangguhan dan kejuangan dalam persaingan menjadi faktor yang paling penting. Kelly mengatakan hal ini pada forum FGD (Focus Group Discussion) Keterwakilan Perempuan yang dilakukan di Volum Cafe, Kamis (16/10).

Hasil riset yang dilakukan oleh KPUD Sumatera Selatan, bekerja sama dengan MH Thamrin & Associates menemukan adanya peningkatan jumlah calon legislatif perempuan di Sumatera Selatan dari tahun 2014 dan 2019. Secara persentase, jumlah peningkatan paling tinggi ada di PKB dengan jumlah calon meningkat 2.73% persen dari tahun 2014. Sementara itu, penurunan (secara persentase atau bila dibandingkan dengan laki-laki) terjadi di PPP, PAN, dan PKS.

MH Thamrin & Associates adalah satu kelompok kerja riset yang ada di Sumatera Selatan. Kelompok ini terdiri dari para ahli dan pengajar bidang studi Administrasi Negara, Pemerintahan, Politik, Komunikasi dan Hubungan Internasional.

Muhammad Husni Thamrin selaku pendiri MH Thamrin & Associates menjelaskan bahwa angka kenaikan aleg perempuan tidak terlalu besar dan adanya kecenderungan rata mereka yang memang sudah memiliki latar belakang keluarga pejabat. "Persoalannya apakah perempuan yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan kaum perempuan? Nah ini yang mungkin masih menjadi tanda tanya besar. Ini akan bisa kita buktikan di tahun-tahun pengabdian berikutnya. Apakah para calon yang terpilih ini memang memperjuangkan kaum perempuan", tutupnya.

Penulis: Refky dan Kharisma  
Editor : Mutiara

**Lampiran 5.8 Artikel di Limas FISIP Unsri**  
(<https://bit.ly/2Ng6gCm>)

...Dinas Perikanan dan Perikanan (DPP) Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Menurut Direktur Perikanan dan Perikanan (DPP) Sumatera Utara, Herman Dero, semua data yang berkaitan dengan ikan yang akan dipasarkan haruslah akurat. Kalau tidak, akan berdampak pada harga ikan yang akan dipasarkan. Herman Dero juga mengatakan, semua data yang berkaitan dengan ikan yang akan dipasarkan haruslah akurat. Kalau tidak, akan berdampak pada harga ikan yang akan dipasarkan.

...Sementara itu, terkait kondisi air Karibia yang semakin memburuk di Sumsel, khususnya Palembang menurut Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Pusat Nazir Fuad memang sangat dipengaruhi kondisi kemarau yang memang telah sekian lama berlangsung tahun-tahun sebelumnya. Ia bahkan mengatakan, kondisi ini tidak hanya terjadi Indonesia juga juga di Rusia, Brazil bahkan Amerika Serikat. "Harus kita siapkan aksi-aksi preventif untuk mencegah banjir," kata Nazir. Menurut Nazir, banjir yang terjadi di Karibia ini akan berdampak pada ekosistem gambut yang ada di Karibia. "Jika banjir terus berlanjut, maka akan berdampak pada ekosistem gambut yang ada di Karibia. Kita harus segera melakukan tindakan preventif untuk mencegah banjir yang terjadi di Karibia."

...Alex menambahkan, kalau kondisi tidak bisa lima unit rumah yang terbawa cepat membantu, sehingga rumah-rumah yang lain, utamanya...

### Pastikan diaan nan

...berharap Sumah Herman Dero...  
...Kerangka Anyar...  
...ketersediaan...  
...Di hadapan...  
...Kordinasi...  
...Provinsi...  
...mengatakan...  
...RT 06...  
...Anyar...  
...arga yang...  
...nggalkan...  
...nak anak...  
...Jadikan...  
...i, yakin...  
...tinggal...  
...Camat...  
...butkan...  
...Sela...  
...rebut...  
...bakar...  
...atnya...  
...nilan...  
...padu...  
...telah...  
...man...  
...litas...  
...erta

## Publik Tunggu Kiprah Perempuan di Legislatif



PEREMPUAN BERPOLITIK: Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana, saat diskusi keterwakilan perempuan di legislatif.

**PALEMBANG, RP** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel mengaku perlu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif. Publik menunggu kiprah kaum hawa legislatif ke depan. "Kuota keterwakilan perempuan pada pencalonan pileg 2019 memang termasuk regulasi baru. Tapi partai politik sudah memenuhi syarat tersebut untuk lolos jadi peserta pileg 2019. Akan tetapi, di masyarakat masih menganggap bahwa perempuan yang mencalonkan diri masih dianggap belum mampu berpolitik," Ketua KPU Provinsi Sumsel Dra Kelly Mariana kepada sejumlah wartawan di acara hasil riset pemilu serentak 2019 untuk caleg provinsi Sumsel oleh MH Thamrin Associates, di Volum Cafe Resto &

Social House, Rabu (16/10). Oleh karena itu, menurutnya penting dilakukan pendidikan politik untuk masyarakat agar perempuan tidak hanya dianggap bisa mengurus masalah yang umum saja. Namun juga mampu ikut serta berpolitik. "Tapi, PR nya sekarang calon perempuan juga harus punya strategi bagaimana agar masyarakat bisa percaya untuk memilihnya di kontestasi pileg," katanya. Dibandingkan dengan 2014, ternyata di Pileg 2019 sudah ada kenaikan akan keterwakilan perempuan di parlemen provinsi Sumsel. "2014 kemarin jumlah kaum perempuan yang terpilih ada 12 orang. Sementara di tahun 2019 ada 16 orang perempuan yang terpilih. Ini artinya sudah ada peningkatan lebih kurang 20 persen. Mungkin untuk kontestasi berikutnya caleg perempuan harus bisa merebut kepercayaan masyarakat agar

memilih kaum perempuan," ujarnya. Terpisah, Direktur MH Thamrin Associates, Dr MH Thamrin mengatakan meningkatnya keterwakilan perempuan di kursi legislatif terjadi secara alamiah akibat makin banyaknya perempuan yang ikut dalam kontestasi Pileg 2019. "Memang angka kenaikannya tidak terlalu besar, karena yang terpilih kebanyakan caleg perempuan yang punya track record baik," ujarnya. Masalah yang terjadi, kata dia, perempuan yang terpilih dan duduk di kursi legislatif belum sepenuhnya menjadi wakil dari kaum perempuan. "Padahal banyak hal yang bisa diperjuangkan dalam kaitannya keterwakilan perempuan ini. Mungkin dengan mendengarkan aspirasi kaum perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bisa menjadi faktor pemicu kenaikan keterwakilan perempuan. Kita lihat saja pengabdian ke masyarakat dari kaum perempuan yang sudah menjadi anggota legislatif di Sumsel," tukasnya. Pimpinan Sementara DPRD Sumsel, Anita Noerihati mengatakan, dalam melakukan sosialisasi tidak semua perempuan sama dengan laki-laki untuk bersosialisasi, misalnya ngopi di warung dapat dilakukan oleh para kaum adam namun tidak bisa dilakukan oleh kaum perempuan. "Harus memiliki metode tersendiri untuk meraup suara, dan harus membangun komunikasi politik dengan para pemilih, dan yang penting munculkan pribadi kita dalam mendekati diri kepada pemilih," kata Anita. (zar)

**JADWAL PENJAJARAN**

Garuda Indonesia  
The Airline Of Indonesia

BOJING 737-300/400/500 J.K.K

Flight No.	Kabupaten/Kota
GA 101	Jam 05.40
GA 103	Jam 06.45
GA 105	Jam 07.45
GA 107	Jam 09.30
GA 109	Jam 11.30
GA 111	Jam 13.30
GA 113	Jam 15.30
GA 115	Jam 17.30
GA 117	Jam 19.30
GA 119	Jam 21.30

**General Manager :** Swandrayadi **Ketua Dewan Redaksi :** Yurdi Yasri **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Sehari-hari :** Swandrayadi **Wakil**  
Karnain Pahlevi **Staf Redaksi :** Ilham, Zarkasim, Septa Kristina **Wartawan Daerah :** Edward Ferdinand (OKUT), Pili Ardiansyah (Muara Enim), Irlay  
Emil Hidayat (OKI), Edli (Pegalarlam), Yudi Saputra (OKU), Maman Wahari (PALI), Mobius Alhazan (Empat Lawang) **Fotografer :** Salamun Sajati, **Pro**  
**Sirkulasi :** M Amir, Sella Seftiani **Iklan :** M Maulana (Pit Manager), Sujito, Heni Effendi **Kuangan :** Riny Rinawaty, Agustinar Pratiwi **Event Organ**  
Sigi Kuntoro **Dewan Redaksi :** Yurdi Yasri, Swandrayadi, Susi Yenuari, M. Asif Ardiansyah **Penerbit :** PT Monica Palembang **Komisaris Utama :** H  
Ayu **Percetakan :** PT. Sumex Intermedia **Alamat Redaksi :** Jl. Basuki Rahmat No. 12 B-C Palembang Telp. (0711) 361638 Fax (0711) 362452 **Tel**  
**Color/Warna :** Rp. 85.000,-/mmk **Halaman Dalam Full Color/Warna :** 55.000,-/mmk **Halaman Dalam BW :** 40.000,-/mmk **HARGA LANGGANAN :** Rp

Lampiran 5.9 Artikel di Radar Palembang

## **Lampiran 6: Profil dan Identitas Kelompok Riset dan Peneliti**

### **Profil Kelompok Kerja Riset**

Riset Keterwakilan Perempuan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan oleh suatu Tim Riset yang tergabung dalam Kelompok Kerja Riset M.H. Thamrin & Associates. Kelompok Kerja Riset ini merupakan suatu kelompok kerja (working group) yang di dalamnya bergabung sekelompok peneliti, akademisi, dan aktivis yang memiliki minat dan idealisme yang sama. Berpijak pada idealisme untuk memberikan kontribusi yang optimal dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, sehat, setara, dan saling menghargai dan minat terhadap kajian-kajian yang tajam, aktual, dan mendalam dan berbasis bukti empiris yang kuat yang menjadi dasar terbentuknya kelompok kerja riset ini. Melalui kajian tersebut diharapkan dapat lahir atau setidaknya mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kehidupan publik yang lebih baik.

### **Tim Peneliti :**

1. M.H. Thamrin (*Team Leader*)
2. Bagindo Togar Butar-Butar
3. Aris Munandar
4. Oemar Madri Bafadhal
5. Ferdiansyah Rivai
6. Gunawan Lestari Elake